

DIKTAT

SOSIOLOGI

Perkotaan & Perdesaan

ILHAM MIRZAYA PUTRA, M.Si

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Edisi Th. 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dikat ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad disampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Saw.

Dikat Mata Kuliah “Sosiologi Perkotaan dan Perdesaan” ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan dalam menempuh mata kuliah Sosiologi Perkotaan dan Perdesaan. Diktat ini disusun dengan merangkum semua materi teoritis dari berbagai sumber. Teknik penyajiannya dilakukan pada setiap pertemuan sebanyak 2 sks.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa diktat ini tentu punya banyak kekurangan. Untuk itu saya dengan berlapang dada menerima masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah saya bermohon semoga semua ini menjadi amal saleh dan bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 25 Februari 2023

Ilham Mirzaya Putra, M.Si
NIP. 199010032019031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I RUANG LINGKUP MASYARAKAT.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Masyarakat	2
C. Mengapa Manusia Hidup Bermasyarakat.....	4
D. Perkembangan Masyarakat.....	6
BAB II ASPEK-ASPEK TRADISIONAL MASYARAKAT DESA	10
A. Pendahuluan.....	10
B. Apa itu Tradisional?.....	10
C. Aspek-Aspek Tradisional	10
D. Masyarakat Tradisional.....	11
BAB III STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA.....	14
A. Pendahuluan.....	14
B. Proses dan Interaksi Sosial	Error! Bookmark not defined.
B. Stratifikasi Sosial	14
C. Perubahan Sosial.....	15
D. Kelembagaan Sosial.....	15
E. Kebudayaan (Norma dan Nilai).....	16
BAB IV POTENSI DAN SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Menggali Potensi Desa	17
D. Potensi Sumberdaya Alam Peternakan	19
E. Potensi Sumber Daya Perikanan.....	20
F. Potensi Sumber Daya Industri	21
BAB V PEMBANGUNAN DESA	23
A. Konsep Pembangunan Masyarakat	23
B. Model Pembangunan	24
C. Pembangunan Desa.....	25
BAB VI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	27
A. Pendahuluan.....	27

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	27
C. Pemberdayaan Miskin Masyarakat Pedesaan	30
D. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Negara Berkembang.....	31
BAB VII MASYARAKAT KOTA	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Pengertian Kota.....	35
C. Sejarah dan Perkembangan Kota	38
D. Fungsi Kota	40
E. Struktur Perkembangan Kota.....	41
F. Kota Sebagai Masyarakat Modern.....	43
G. Karakteristik Masyarakat Kota	48
BAB VIII KOTA DAN TRANSPORTASI.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Problem: Kemacetan.....	51
C. Transportasi	52
BAB XI KOTA DAN ANAK JALANAN DAN GEPENG (GELANDANGAN PENGEMIS)	56
A. Pendahuluan.....	56
B. Pengertian Anak Jalanan.....	56
C. Proses Terjadinya Anak Jalanan.....	57
D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan	58
E. Pengetian Gelandangan dan Pengemis	59
F. Penyebab Gelandangan dan Pengemis.....	59
BAB X KOTA DAN PENGANGGURAN	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Pengertian Pengangguran	61
C. Sebab-Sebab Pengangguran.....	61
D. Jenis-Jenis Pengangguran	62
E. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Pengangguran.....	63
F. Dampak (Akibat) Pengangguran	63
G. Strategi Dan Program Penanggulangan Pengangguran	64
BAB XI KOTA DAN PEMUKIMAN KUMUH.....	66
A. Pendahuluan.....	66
B. Problem: Pemukiman dan Kemiskinan.....	66

C. Pengertian Pemukiman Kumuh	67
D. Faktor Penyebab Tumbuhnya Pemukiman Kumuh	69
E. Dampak Urbanisasi Terhadap Perkembangan Pemukiman Kumuh.....	70
BAB XII KOTA DAN KRIMINALITAS	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Pengertian Kriminologi.....	71
C. Pengertian Kejahatan	72
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	72
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	74
BAB XIII KOTA DAN KENAKALAN REMAJA.....	75
A. Pengantar	75
B. Pengertian Remaja	75
C. Pengertian Kenakalan Remaja	76
D. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	77
E. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja	77
F. Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja	79
G. Kenakalan Remaja: Tawuran Pelajar (Perkelahian Antarkelompok).....	80
H. Kenakalan Remaja: Geng Motor	81
I. Kenakalan Remaja: Narkoba	82
J. Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	83
BAB XIV KOTA DAN KEMISKINAN.....	84
A. Pengantar	84
B. Problem: Potret Kemiskinan di Indonesia	85
C. Pengertian Kemiskinan	86
D. Indikator Kemiskinan (Ardianyah Tambunan).....	87
G. Ciri-Ciri Kemiskinan	90
H. Jenis-Jenis Kemiskinan.....	91
I. Strategi Penanggulangan Kemiskinan	91
J. P2KP: Model Pemberdayaan Kemiskinan di Perkotaan.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I RUANG LINGKUP MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Dalam kajian sosial manusia adalah makhluk yang paling unik dan paling menarik untuk diperbincangkan, banyak istilah yang dialamatkan untuk manusia salah satunya yaitu makhluk individu, sosial, makhluk berbudaya dan makhluk berpikir : *zoon politicon* (makhluk sosial yang menyukai bergolongan), sosial animal atau *gregariousness* (manusia punya naluri hidup berkawan) dan seterusnya adalah *man is a social and political being* (makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat). Istilah kekinian yang berkembang adalah manusia seutuhnya yaitu sebagai sosok manusia yang mempunyai ciri karakter yang bersifat hakiki dan kodrati, manusia yang seimbang dari berbagai segi, yaitu segi individu, sosial, jasmani dan dunia dan akhirat, model ini menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dan dirinya, manusia sesama manusia, manusia dengan alam sekitar (lingkungan) dan manusia dengan tuhan.

Dengan istilah-istilah tersebut menggambarkan bahwa manusia dilahirkan dan hidup tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain melainkan diciptakan berkelompok yakni (bermasyarakat) hidup berkelompok ini adalah merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta dalam mempertahankan hidupnya baik terhadap bahaya yang datang dari dalam maupun yang dari luar. Bisa disimpulkan bahwa dalam diri manusia terdapat dua keinginan yang melekat yaitu keinginan menyatu dengan lingkungan dan keinginan menyatu dengan sesama manusia yang bertujuan menjalin interaksi sosial. Soerjono Soekanto (2004:61) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah menjadi factor utama sekaligus syarat utama terbentuknya kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak akan terjadi relasi sosial maupun adaptasi yang bertujuan untuk saling melengkapi antara satu sama lain.

Tujuan daripada interaksi sosial adalah untuk menciptakan ketertiban untuk mengatur manusia dan keamanan untuk melestarikan keberlangsungan hidupnya. Untuk membudayakan tata kelakuan untuk menjadi aturan dan hukum bagi masyarakat perlu dibentuk norma dan nilai dalam masyarakat tersebut agar manusia selalu dalam aturan dan pengawasan sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Soerjono soekamto (2004:61) pentingnya pembudayaan tata kelakuan dan norma dalam bermasyarakat, sebagai berikut:

1. Tata kelakuan memberikan batas pada perilaku individu, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena kelakuan timbul dari suatu pengalaman yang berbeda.
2. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Pada satu pihak tata kelakuan memaksa individu atau seseorang untuk menyesuaikan tindakannya dengan masyarakat yang berlaku, sedangkan disisi lain tata kelakuan ini mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang karena kesanggupannya dalam menyesuaikan dirinya, contohnya seperti perilaku menyimpang seperti melakukan tindak kriminal dan kejahatan, warga atau masyarakat menghukum pelaku tersebut sesuai dengan peraturan atau kelakuan yang berlaku di masyarakat tersebut.

3. Tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, yang berlaku untuk semua orang yang bertujuan menjaga keutuhan dan kerja sama antar sesama.

Berikut ini adalah sejumlah norma yang berstandar kelakuan di kalangan masyarakat :

1. Norma agama, yaitu merupakan aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan yang bersumber dari Allah SWT, dan bagi yang melanggar norma ini akan disiksa di akhirat kelak.
2. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah pelanggaran yang berujung penyesalan.
3. Norma kesopanan, yaitu norma yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan masyarakat yang bertujuan untuk saling menghormati, norma kesopanan sering disebut adab, tata kerama yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat itu sendiri, pelanggaran norma kesopanan akan mengakibatkan celaan dari masyarakat itu sendiri
4. Norma hukum, yaitu peraturan yang diciptakan oleh pemerintahan negara, yang bersumber berupa perundang-undangan, yuris prudensi, doktrin dan keistimewaan norma hukum adalah sifatnya yang memaksa, dan bagi yang melanggar mendapatkan sanksi kenegaraan berupa ancaman hukuman.

Dengan demikian jelas bahwa masyarakat dan kebudayaan saling melengkapi dan dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat adalah kumpulan manusia sebagai pengisinya yang saling berhubungan atau (berinteraksi) satu sama lain, sedangkan kebudayaan merupakan system norma dan nilai yang terorganisasi dan menjadi pegangan terhadap masyarakat itu sendiri.

B. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari Bahasa Arab “*syaraka*” yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*”, yang artinya saling bergaul. Dalam Bahasa Inggris, dipakai istilah “*society*”. Kata tersebut berasal dari kata latin “*socius*”, yang artinya kawan. Pendapat lainnya menyebutkan istilah masyarakat, yaitu dengan kata *society* dan *community*.

1. Society

Dalam istilah *society*, masyarakat diterjemahkan sebagai suatu badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang bersama biasanya dianggap sebagai suatu golongan dan terbagi kedalam beberapa kelas menurut kedudukan dalam masyarakat tersebut.

2. Community

Soerjono Soekanto (2004:149) menjelaskan bahwa istilah *Community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat seperti warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Ciri utama masyarakat setempat ini adalah adanya *social relationships* antara anggota kelompoknya. Pengertian lain, istilah *community* lebih mengarah pada pengertian masyarakat dalam arti paguyuban. Kalau *society* berarti masyarakat umum, *community* menunjukkan arti masyarakat yang terbatas, misalnya masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung, dan lainnya. Pada umumnya masyarakat dalam arti

community, selain karena sentiment yang sama, juga menunjukkan suatu lokalitas, pembatasan letak kediamannya, karena itu dinamakan juga masyarakat setempat, masyarakat sini. Basrowi menjelaskan bahwa masyarakat dalam arti *community* dapat dilihat dua sudut pandang:

- a. Sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat.
- b. Sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, maka didalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan lainnya.

Dalam beberapa literatur juga sering ditemukan istilah lain, seperti *kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan*.

a. Komunitas

Komunitas diartikan sebagai wujud masyarakat yang konkret, yang selain memiliki ikatan berdasarkan suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu, dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki semua kesatuan masyarakat, juga terikat oleh lokasi yang nyata dan kesadaran wilayah yang konkret.

b. Kategori Sosial

Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terjadi karena adanya ciri atau kompleks cirri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada warga atau anggotanya. Sebagai contoh, dalam hukum suatu negara ditentukan bahwa untuk membedakan antarwarga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan yang tidak ada kategori warga yang berumur diatas 18 tahun dan kategori warga yang berumur dibawah 18 tahun.

c. Golongan Sosial

Golongan sosial merupakan kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu yang bahkan sering dikenakan oleh pihak luar kepada mereka. Walaupun demikian, suatu kesatuan manusia seperti itu memiliki ikatan identitas sosial karena kesadaran identitas itu tumbuh atas respon terhadap penilaian pihak luar terhadap mereka, atau karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, norma, atau adat-istiadat tertentu.

d. Kelompok dan Perkumpulan

Suatu kelompok (dalam bahasa Inggris disebut *group*) juga dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat karena memiliki interaksi antaranggota, adat-istiadat, dan sistem norma yang mengatur interaksi, kesinambungan, dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota.

Terdapat dua jenis kelompok berdasarkan organisasi:

- 1) organisasi yang sengaja dibentuk, lengkap dengan aturannya serta sistem norma yang mengikat para anggotanya,
- 2) organisasi yang terbentuk karena adanya ikatan alamiah dan keturunan, yang mengikat para warganya dengan adat-istiadat serta sistem norma yang telah tumbuh sejak dulu.

Kelompok berdasarkan organisasi yang sengaja dibentuk/ organisasi buatan dalam bahasa Inggris adalah *group* atau *primary group*, sedangkan sistem organisasinya adalah *informal organization*, contohnya PSIM. Kelompok berdasarkan organisasi yang terbentuk secara alamiah, dalam bahasa Inggris disebut *association*, dan sistem organisasinya disebut *formal organization*. Dalam bahasa Indonesia istilah *association* yang dasarnya adalah organisasi buatan diganti dengan istilah “*perkumpulan*”. Group sebaiknya diterjemahkan dengan “kelompok”, atau kalau perlu “kelompok primer”. Ada beberapa pengertian masyarakat dari para ahli sosiologi:

1. Emile Durkheim mengartikan masyarakat sebagai kenyataan objek individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
2. Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan akibat pertentangan antarkelas sosial karena pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya.
3. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin atau yang biasanya disebut dengan Gillin dan Gillin (1954) menjelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
4. Koentjaraningrat (2000: 146) mengartikan masyarakat sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama dan ditempat tersebut, anggota-anggotanya melakukan regenerasi (berkembang biak). Secara substansi dari beberapa uraian tersebut terdapat titik temu bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang memiliki unsur-unsur berikut.

1. Terdiri dari sejumlah orang yang berjumlah sangat banyak, saling berinteraksi antara satu dan lainnya dan menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan.
2. Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar (makro) antar kelompok.
3. Menempati wilayah tertentu dan hidup di dalam wilayah tersebut.

C. Mengapa Manusia Hidup Bermasyarakat

Ibnu Khaldun memberikan alasan bahwa manusia hidup secara bersama karena tiga alasan, yaitu alasan ekonomi, alasan keamanan, dan alasan otoritas. Adapun Murtadha Mutahari (1995: 15-19) menjelaskan teori tentang mengapa manusia ingin hidup secara bersama, yaitu sebagai berikut.

1. *Manusia bersifat kemasyarakatan*. Menurut teori ini, kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan. Artinya, secara fitri ia bersifat kemasyarakatan. Kehidupan bermasyarakat manusia sama dengan kerekanaan seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, menurut teori ini, kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan akan tetap maujud selama ada

- pembagian kerja, pembagian keuntungan, dan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya.
2. *Manusia terpaksa bermasyarakat*. Menurut teori ini, kehidupan bermasyarakat ibarat kerja sama, seperti suatu fakta antara dua negara yang tidak mampu mempertahankan diri terhadap
 3. *Manusia bermasyarakat berdasarkan pilihannya*. Menurut teori ini, kehidupan bermasyarakat serupa dengan persekutuan dua orang bermodal yang membentuk suatu badan usaha untuk

Dari ketiga teori di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori pertama, faktor utamanya adalah melekat pada fitrah manusia itu sendiri; pada teori kedua, faktor utamanya adalah sesuatu yang berada di luar dan lepas dari manusia, sedangkan pada teori ketiga, faktor utamanya adalah kemampuan akal dan kemampuan memperhitungkan manusia.

1. Faktor Pembentuk (unsur-unsur) Masyarakat

a. Manusia Hidup secara Bersama

Kehidupan bersama ditandai dengan hidup secara berkelompok, dalam wilayah atau tempat yang sama dan bersatu serta saling melindungi dan memelihara agar terjalin dan terjaga kebersamaan di antara mereka secara permanen. Kebersamaan adalah fitrah manusia. manusia adalah kumpulan potensi yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan di tengah-tengah kumpulan manusia lain. manusia memiliki ciri hakikatnya di antaranya:

- 1) Memiliki hasrat yang berdasarkan naluri (kehendak biologis yang ada di luar penguasaan akal) untuk mencari teman hidup;
- 2) Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama;
- 3) Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan;
- 4) Bergeson berpendapat bahwa manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya.

b. Bercampur dalam Waktu yang Cukup Lama

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa masyarakat adalah kumpulan individu manusia yang dapat hidup secara bersama, dan proses menjadi kesatuan manusia membutuhkan waktu yang cukup lama. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan masyarakat. Dari keluarga tersebut, berkembangnya keluarga lainnya, yang lambat laun dalam waktu yang cukup lama akan terbentuk sebuah masyarakat. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007: 227) menambahkan bahwa keluarga adalah lembaga sosial dasar tempat semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Diawali dengan keluarga batih (*nuclear family*), yaitu kelompok yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. Menurut Soerjono Soekanto (1990: 23), keluarga batih mempunyai peranan tertentu, yaitu:

- 1) Pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dan ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya;
- 2) Menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup;

- 3) Tempat manusia mengalami proses sosialisasi awal, yaitu proses manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Lambat laun, proses keluarga batih semakin besar sehingga terbentuklah keluarga luas (*extended family*), yaitu keluarga batih ditambah keluarga lain (hasil perkawinan anak-anaknya) atau kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Kehidupan masyarakat desa kebanyakan adalah keluarga, sanak kerabat, atau famili sehingga kekerabatan di desa sangat kuat dan terpelihara karena didasarkan pada persaudaraan yang sedarah dan sama. Dengan demikian, masyarakat adalah kumpulan individu manusia yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan serta hidup dalam suatu tempat dengan kurun waktu yang lama.

c. Satu Kesatuan

Sebagai *social animal*, manusia mempunyai naluri hidup untuk berkawan atau disebut juga *gregariosness* (Soerjono Soekanto, 2004: 25). Keinginan hidup bersama dan berkelompok dibangun dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan di antara mereka. Untuk keutuhan kelompoknya, manusia senantiasa menghindari pertikaian atau permusuhan di antara sesama.

d. Sistem Hidup Bersama

Inilah keunikan sebuah masyarakat. Kesadaran akan kesatuan kelompoknya serta untuk menjaga keutuhan kelompoknya, dibuatlah sebuah sistem hidup bersama. Sistem hidup dibangun untuk mewujudkan pelbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, agar masyarakat dapat hidup terus. Di antara berbagai kebutuhan hidup itu, seperti sistem hukum (nilai dan norma), sistem komunikasi, sistem produksi, sistem distribusi, sistem organisasi sosial, system pengendalian sosial, serta perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

D. Perkembangan Masyarakat

Soerjono Soekanto (1984: 49-51) menjelaskan bahwa tahap perkembangan masyarakat Indonesia terdiri atas tiga tahap, yaitu masyarakat sederhana, madya dan pra modern/modern.

1. Masyarakat Sederhana

Masyarakat sederhana adalah masyarakat yang mengalami perkembangan lambat dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan dalam keluarga maupun dalam masyarakat sangat erat
- b. Organisasi social didasarkan pada adat-istiadat yang berbentuk tradisi turun-temurun
- c. Percaya adanya kekuatan gaib
- d. Tingginya tingkat buta huruf dan tidak ada lembaga yang mengatur bidang pendidikan dalam masyarakat.
- e. Kegiatan perekonomian dan sosial memerlukan kerja sama yang dilakukan oleh orang banyak dan secara tradisional dengan sistem gotong royong.

2. Masyarakat Madya

Masyarakat ini telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masyarakat sederhana, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hubungan dengan keluarga tetap kuat, tetapi hubungan antaranggota masyarakat mulai mengendur dan mulai didasarkan pada kepentingan untuk memenuhi untung-rugi atas dasar kepentingan ekonomi.
- b. Adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat masih dihormati, dan masyarakat mulai terbuka dengan adanya pengaruh dari luar.
- c. Timbulnya pemikiran yang rasional, menyebabkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib sudah mulai berkurang.
- d. Lembaga-lembaga pendidikan mulai muncul dan tingkat buta huruf bergerak turun.
- e. Ekonomi yang berorientasi pasar mulai menambah persaingan di bidang produksi. Hal ini memengaruhi perbedaan struktur sosial dalam masyarakat, sehingga nilai uang memegang peranan penting.

3. Masyarakat Pra Modern atau Modern

Masyarakat ini telah mengalami perkembangan atau mengalami kemajuan karena hubungan dengan masyarakat yang lain telah intensif, banyak menerima informasi dari luar melalui media elektronik, bahkan masyarakat yang bersangkutan sering berusaha di luar wilayahnya, sehingga mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan-perubahan yang datang dalam kehidupan mereka. Asmuni Syukir (1983: 78) menjelaskan bahwa ditinjau dari peradabannya, masyarakat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu masyarakat primitif (suku terasing), masyarakat sederhana (masyarakat pedesaan), dan masyarakat maju (masyarakat kota).

a. Masyarakat Primitif (Suku Terasing)

Masyarakat primitif adalah kelompok masyarakat yang masih asli peradaban atau kebudayaannya, artinya kebudayaan yang dimiliki tidak bercampur atau pengaruh dari dunia luar. Masyarakat primitif ini pada umumnya terdapat di daerah pedalaman (pegunungan atau pedesaan). Ciri-ciri masyarakat primitif, yaitu sebagai berikut.

- 1) Isalamet, terasing dari dunia luar.
- 2) Konservatif, kebudayaan berkembang dengan lamban.
- 3) Kurang deferensiasi (pemisahan)

Sifat-sifat masyarakat primitif adalah memiliki solidaritas yang tinggi, uniformitas anggota masyarakat yang besar, dan hak milik perseorangan tidak nampak.

b. Masyarakat Sederhana (Masyarakat Pedesaan)

Masyarakat desa adalah masyarakat community (masyarakat setempat) artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya. Karakteristik masyarakat desa adalah sebagai berikut, yaitu: pola hidup masyarakat yang sangat erat dengan alam, masyarakat religious/animisme/dinamisme, sebagian mata pencaharian masyarakat adalah agraris.

c. Masyarakat Kota

Masyarakat kota sebagai community juga merupakan masyarakat society. Pada masyarakat kota, anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal, dan lebih terikat kontak kekeluargaan, hubungannya serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen serta ikatan tradisi dengan tanpa

kepemimpinan mapan. Ciri-ciri masyarakat kota adalah sebagai berikut, yaitu: heterogenitas sosial, hubungan sekunder, toleransi sosial, kontrol (pengawasan sekunder), mobilitas sosial, ikatan sosial, bersifat individualistik, persaingan yang menyebabkan segregasi.

Graham C. Kinloch dalam Dadang Kahmad (2005: 92) menyebutkan bahwa tipologi Emile Durkheim dalam mengklasifikasikan masyarakat ke dalam dua bagian, yaitu dengan membandingkan sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

- a. Masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik
 - 1) Pembagian kerja rendah;
 - 2) Kesadaran kolektif tinggi;
 - 3) Hukum resesif dominan (menekan);
 - 4) Individualitas rendah;
 - 5) Konsensus terhadap pola-pola normatif penting;
 - 6) Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang;
 - 7) Secara relatif saling kebergantungan itu rendah;
 - 8) Bersifat primitif dan pedesaan
- b. Masyarakat dengan tipe solidaritas organik
 - 1) Pembagian kerja tinggi;
 - 2) Kesadaran kolektif rendah;
 - 3) Hukum restitutif dominan (memulihkan);
 - 4) Individualitas tinggi;
 - 5) Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting;
 - 6) Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang;
 - 7) Saling kebergantungan tinggi;
 - 8) Bersifat industrial-perkotaan.

Dalam pandangan Karl Marx, masyarakat (struktur sosial), dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok masyarakat borjuis (kaum kaya) dan kelompok masyarakat proletariat (kaum miskin). Dalam perkembangan dua bagian besar struktur sosial (masyarakat) ini, Marx melihat tahapan sejarah perkembangan masyarakat (Anthony Giddens, 1986: 32-42), yaitu:

1. Masyarakat kuno, umumnya didominasi oleh perbudakan;
2. Masyarakat feodal, umumnya didominasi oleh tuan-tanah;
3. Masyarakat borjuis, umumnya didominasi oleh buruh upahan;
4. Masyarakat komunis, dengan inddikasinya manusia menjadi pribadi-pribadi bebas yang melaksanakan fungsinya dengan alat produksi milik bersama.

1. Masyarakat Kuno atau Primitif

Disebut juga dengan komunisme primitif karena mencakup kepemilikan tanah bersama. Kegiatan ekonomi yang pokoknya adalah berburu, memancing, memelihara ternak sampai pada pertanian. Spesialisasi pekerjaan tidak ada, bahkan sangat sedikit, sehingga unit sosialnya didasarkan pada keluarga. Suku-suku terdiri atas sejumlah keluarga dan kepala sukunya bersifat patrialkal. Dengan demikian, tidak ada kelas-kelas karena tidak ada hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan sebuah negara, sebab hubungan sosial adalah hubungan kekerabatan dan pembagian kerja secara spontan dalam kelompok keluarga.

2. Masyarakat Perbudakan

Sistem perbudakan sebagai alat untuk mengorganisasikan sistem produksi yang lebih terspesialisasi. Dengan cara ini, akan diperoleh devisa untuk pertumbuhan daerahnya dengan kesatuan suku-suku. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai cikal bakal kelas-kelas dan dimulainya konflik kelas bagi para budak sebagai bagian dari dimulainya sistem produksi. Perbudakan bukan saja dianggap sebagai bagian penjajahan atau menjajah, tetapi merupakan konsekuensi dari perkembangan di dalam cara-cara produksi.

3. Masyarakat Feodal

Muncul di daerah pedesaan dengan proses produksi pertanian yang dilaksanakan oleh budak. Pada tahap ini, kegiatan produksi menjadi usaha individu atau keluarga. Ia mengumpulkan bahan mentah dan menggarapnya sendiri sampai jadi. Pembagian kerja terjadi dalam keluarga meluas sampai tingkat spesialisasi tertentu. Hasil produksinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, kemudian sisanya dijual kepada pengusaha feodal sehingga penguasa feodal menguasai para petani dalam wilayah tersebut.

4. Masyarakat Kapital

Perubahan dari feodal ke kapital diawali dengan produksi yang melebihi konsumsi yang lama-lama menyebabkan individu memproduksi untuk maksud-maksud pertukaran dan menjual dengan keuntungan tidak lagi untuk sekadar mencukupi kebutuhan. Dalam sistem kapitalis, sarana produksi bersifat sosial (karena dijalankan oleh banyak orang), sehingga dalam situasi demikian, manusia diperlakukan semata-mata menurut kegunaan mereka oleh mereka yang memiliki sarana produksi. Di sini hanya ada ikatan uang (bayar buruh), tanpa ikatan lain. Sistem ekonomi demikian menghancurkan hubungan produsen individualnya dengan produk individualnya. Kemudian menjadikan manusia teralienasi atas karya sesungguhnya.

5. Masyarakat Komunis

Visi Marx mengenai masyarakat komunisnya adalah visi tentang kemakmuran material karena ia percaya bahwa produksi ilmiah modern tidak hanya menyediakan sarana kelangsungan hidup yang memadai, tetapi lebih dari memadai. Nilai utama yang ia inginkan adalah nilai kebebasan, yang ia artikan kemampuan untuk mengontrol lingkungan manusia dan membuatnya melayani kebutuhan-kebutuhan manusia. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Antara kota dan desa pada umumnya terlihat ada perbedaan sosial dan kebudayaan yang besar. Bagi orang desa, kota dianggap berbahaya, harus waspada, banyak pengetahuan, dan muslihatnya. Dan segi akhlak juga, kota adalah pusat kekuasaan, kekayaan, dan sekaligus pengetahuan. Sebaliknya, desa menurut pikiran orang kota, juga bermacam-macam. Dikatakan bodoh, kurang pengetahuan, dan membiarkan dirinya disalahgunakan. Akan tetapi, desa juga memiliki kelebihan, yaitu kebudayaan yang asli dan menghayati kehidupan yang baik dan sederhana. Karena ada perbedaan sosial dan kultural, diperlukan tokoh perantara untuk menjembatannya. Misalnya tokoh di bidang politik adalah kepala desa; di bidang ekonomi adalah para pedagang, tengkulak, lintah darat, dan tuan tanah; di bidang budaya dan agama adalah ulama, kiai, pendeta, ahli seni, dan sastra.

BAB V

PEMBANGUNAN DESA

A. Konsep Pembangunan Masyarakat

1. Pengertian Pembangunan Masyarakat

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara Bersama. Ada pula yang mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Menurut Soelaiman M. Munandar, pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi (keterbukaan);
- b. Partisipasi;
- c. Dapat dinikmati masyarakat;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas);
- e. Berkelanjutan (*sustainable*).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan memerlukan kinerja yang erat antara desa dan satu daerah/wilayah dan antar daerah/wilayah. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan kesesuaian hubungan antara kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Pada umumnya, lokasi ini terkonsentrasi yang mempunyai dampak keberkaitan dengan daerah-daerah sekitarnya, sehingga dengan kerja sama antar daerah/desa, daerah-daerah/desa-desa yang dimaksud diharapkan dapat tumbuh dan berkembang

2. Strategi Pembangunan Masyarakat

Strategi pembangunan masyarakat mirip dengan strategi pembangunan pedesaan. Asas atau karakteristik masyarakat adalah memiliki sifat semangat masyarakat bergotong royong dan tolong-menolong, tidak bersifat individualitas, membangun secara bersama-sama, melibatkan anggota masyarakat. Demikian pula dengan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan masyarakat atau community development strategy mempunyai asas yang serupa dengan strategi pembangunan pedesaan. Apabila dikaji lebih dalam dan lebih luas, konsep community development dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up, yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan perkotaan.

Strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah-langkah pelaksanaan strategi pembangunan masyarakat diperlukan perumusan serangkaian kebijakan (policy formulation method and technique). Strategi untuk seluruh pembangunan adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Berikut beberapa tahapan dalam pembangunan yang menjadi pilihan yang mungkin dapat di contoh antara lain. Pertama, tahapan perencanaan pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui tahapan perencanaan, dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil

yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Kedua, tahapan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan merupakan seluruh kegiatan yang saling berkaitan dengan berbagai kemungkinan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, sebuah proyek atau perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh institusi pemerintah, perusahaan swasta atau pihak asing. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah, manajemen pembangunan bertugas untuk menjamin proyek-proyek pembangunan, baik secara fisik dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran dengan cara yang seefisien mungkin.

Ketiga, tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, proses yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah pemantauan atau monitoring. Monitoring sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembangunan. Monitoring merupakan prosedur dalam tahapan pembangunan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sejauh mana kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan dapat diperbaiki. Tahap selanjutnya dalam proses pembangunan adalah tahapan evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk mengetahui hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan sebelum dan sesudah pembangunan.

3. Tujuan Pembangunan Masyarakat

Di beberapa wilayah pedesaan, tujuan pembangunan adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk memecahkan masalah kependudukan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan harus sesuai dengan potensi ekonomi yang dominan. Terlebih, pembangunan pedesaan merupakan bagian terpenting pembangunan nasional yang harus memerhatikan distribusi pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kestabilan ekonomi nasional.

B. Model Pembangunan

Pembangunan di Indonesia dalam pelaksanaannya memiliki beberapa model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut.

1. Model Pembangunan 1 (Pertumbuhan)

Model pembangunan ini berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Pembangunan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional. Proses pembangunan terpusat pada produksi. Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menempuh industrialisasi dan penanaman modal sebagai penggerak utama pembangunan. Unsur utama yang menjadi indikator model pembangunan ini adalah pertumbuhan pendapatan nasional, pendapatan nasional per kapita, tingkat penanaman modal, dan tabungan masyarakat. Penghapusan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, peningkatan pendapatan per kapita, dan pemerataan dicapai melalui efek tetesan ke bawah. Penerapan model pembangunan ini terjadi pada Pelita I dan II.

2. Model Pembangunan II (Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok/Kebutuhan Dasar)

Model pembangunan ini berkembang pada dekade 1970-an. Tugas pemerintah adalah sebagai pemberi pelayanan. Orientasi pembangunan pada pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, pertanian, dan perdesaan. Pemberantasan pengangguran dan ketidakmerataan merupakan tujuan eksplisit pembangunan model ini. Pembangunan mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung, tidak hanya melalui mekanisme trickle down effect. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, konsumsi bahan-bahan, pokok, Kedua, pelayanan, pokok, Ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi, Penerapan model pembangunan ini terjadi pada Pelita III dan IV. Model pembangunan ini banyak menuai kritik karena kurang memerhatikan peranan manusia dalam pembangunan. Penduduk miskin menerima secara pasif pelayanan apa pun yang diberikan oleh pemerintah sehingga menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah.

3. Model Pembangunan III (Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia)

Model pembangunan ini berkembang akhir dekade 1980-an. Pembangunan menekankan keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan, pembelajaran masyarakat, dan memanfaatkan kondisi lokal. Peranan pemerintah adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, Penerapan model pembangunan ini terjadi pada Pelita V.

4. Model Pembangunan IV (Peningkatan Daya Saing)

Model pembangunan ini berkembang pada akhir abad ke-20. Menurut Supriatna, pembangunan berupaya untuk meningkatkan daya saing. Lokus model ini adalah nation state dalam keseluruhan unsur dan isinya, serta upaya peningkatan daya saing, pengembangan kemitraan dalam independensi global yang dinamis, dan didasari nilai-nilai budaya universal. Timbul kesadaran pemerintah terhadap perlunya melakukan pergeseran kebijakan dan reorientasi arah pembangunan. Mekanisme pembangunan yang terlalu sentralistis, birokratis, supply oriented, proses tertutup tidak dapat dipertahankan lagi karena globalisasi tersebut, sehingga paradigma harus diubah melalui transformasi segala aspek kehidupan

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), partisipasi masyarakat (*community participation*), dan organisasi kemasyarakatan (*community organisation*). Adapun pembangunan desa sebagai rural development mempunyai arti yang lebih luas lagi. Pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan

berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA). Dengan cara ini, peningkatan pengembangan desa swadaya ke desa swakarsa selanjutnya menuju desa swasembada dapat dengan cepat diwujudkan.

2. Strategi (Pelaksanaan) Pembangunan Desa

Pada masa Orde Baru, secara substansial strategi pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa diserahkan kepada desa itu sendiri. Adapaun pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan, dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi bottom-up dan top-down. Kemudian, dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan desa, yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi *existing* desa tersebut. Hal yang lebih penting dari semua itu adalah pembangunan desa menjadi "gaya hidup" Artinya, orientasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik telah tertanam sebagai komitmen umum masyarakat desa yang melembaga, sehingga dalam perjalanan waktu, selalu diupayakan agar dengan sumber daya, aset, dan kemampuan yang dimiliki dapat dicapai kehidupan yang lebih baik.

3. Tujuan Pembangunan Desa.

Tujuan dasar dari pembangunan pedesaan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan yang berkepanjangan. Adapun inti dari pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tenaga kerja pedesaan, juga mempertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi, dan keterampilan masyarakat. Adapun tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera, sesuai dengan visi pembangunan nasional bangsa Indonesia.

BAB VI

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. Pendahuluan

Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang menyebar sampai desa terpencil. Sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar di daerah pedesaan. Akan tetapi, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakann petani yang kehipannya semakin tertindas dan harus menjadi tumbal atas kebijakan prekonomian pemerintah. Contoh, mahalnya harga bahan bakar, pengurangan subsidi pupuk dan lain sebagainya.

Sebenarnya, banyak banyak proyek pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, akan tetapi, persoalannya, proyek atau program tersebut masih sebatas pemberian bantuan fisik kepada masyarakat, baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih, dan sebagainya. Ketika proyek berakhir, keluaran proyek tersebut tidak berfungsi lagi bahkan hilang.

Oleh karena itu, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan semata, tetapi lebih memfokuskan pada aspek dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Artinya, proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain, seperti pelatihan keterampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, dan lain sebagainya. Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, mulai dari intelektual, aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajerial

Kemampuan berbudaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Berkaitan dengan program pembangunan, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Berubahnya paradigma pembangunan nasional kearah demokratisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pada awalnya, masyarakat ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, sekarang justru sebaliknya masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut:

- a. Pertama : upaya itu harus terarah, yang secara populer disebut pemihakan.
- b. Kedua : program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh yang menjadi sasaran.
- c. Ketiga : menggunakan pendekatan kelompok, karna secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Berikut beberapa definisi pemberdayaan:

- a. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan).
- b. Pemberdayaan berasal dari kata asing *empowerment*. Secara bahasa, berarti penguatan, secara istilah, berarti dapat disampaikan dengan istilah pengembangan.
- c. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dengan dua pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menetapkan posisi masyarakat posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang bergantung pada pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek yang berbuat secara mandiri. Kedua, masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Pemberdayaan juga menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam. (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan mengemukakan pendapat. (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatannya. (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.
- e. Perkembangan masyarakat merupakan sebuah pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, berifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dalam rangka ini diperlukan langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana .
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*) pemberdayaan meliputi dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan kurang beruntung. Pendapat lain tentang tujuan dari gerakan pemberdayaan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Membantu percepatan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok, dan sebagainya.
- b. Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

- c. Mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga DPD, PKK, KUD, karang taruna untuk aktif dalam pembangunan masyarakat desa.
- d. Mengembangkan kelembagaan dan kelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- e. Mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pemberdayaan masyarakat.
- f. Mengembangkan pusan dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Ada berbagai bentuk atau program pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah.
- b. Pemberdayaaan ekonomi
- c. Pemberdayaan sosial budaya

3. Pemberdayaan lingkungan

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, secara umum kegiatan-kegiatan tersebut dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan berikut.

- a. Bantuan modal. Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan.
- b. Bantuan pembangunan prasarana. Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana.
- c. Bantuan pendampingan. Tugas utama pendampingan adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.
- d. Kelembagaan. Kebesaran sebuah lembaga ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan.

4. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek diantaranya adalah.

- a. Peranan pemerintah sangat penting. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dibuat:
 - 1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat
 - 2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat.
 - 3) Birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuan maupun cara bekerjanya.
 - 4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat.
 - 5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat, yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
 - 6) Birokrasi harus menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.
- b. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat.
- c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari luar dan di dalam masyarakat, atau sering disebut sebagai *local community organization*.

C. Pemberdayaan Miskin Masyarakat Pedesaan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka masih menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, ditambah lagi tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian masih buta huruf), rentan terhadap penyakit, serta jumlah penghasilan yang hanya cukup untuk makan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya)! juga berjalan agak lamban. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan.

Oleh karena itu, usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks. Pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencakup kebutuhan dasar. Lebih dari itu, upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Beberapa metode pendekatan untuk memposisikan petani sebagai mitra, bukan hanya sebagai objek atau penonton, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan secara partisipatif dan dialogis, secara bersama-sama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan program secara nyata yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas.
3. Pendekatan tradisi, perencanaan ataupun pelaksanaan suatu program harus mempertimbangkan kelembagaan masyarakat desa yang sudah ada.
4. Menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping lapangan.

Beberapa langkah praktis untuk memahami kebutuhan masyarakat pedesaan melalui pendekatan partisipatif dan dialogis adalah sebagai berikut:

1. Bersama petani, mengumpul informasi tentang kebutuhan masyarakat pedesaan, melalui banyak media formal, nonformal, atau ataupun informal yang sudah melembaga di pedesaan.
2. Dari petani, mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat pedesaan.

Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan yang dikelompokkan dalam empat sektor utama dengan beberapa sub kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya alam
- b. Pertanian
- c. Program untuk persamaan
- d. Kesehatan dan gizi

Dari keempat sektor utama yang telah dijelaskan, tentunya akan lebih efektif apabila banyak melibatkan masyarakat pada wilayah tersebut dan terprogram sesuai dengan potensi masyarakat yang ada. Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan telah dilakukan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang sering dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan Masyarakat di pedesaan pemerintah orde lama.

Pada masa itu, pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pada pelaksanaannya, pembangun pembangunan justru terhenti dan penduduk miskin makin bertambah. Krisis politik pada tahun 1965 berdampak pada inflasi yang mencapai 650% akan tetapi penyebabnya bukan itu saja melainkan beberapa faktor lainnya, yaitu kurangnya pemahaman pembangunan yang memberdayakan masyarakat dan rakyat dijadikan basis ideologi politik serta kurangnya kecakapan.

2. Program pemberdayaan masyarakat di pedesaan pemerintah orde baru

Order baru mulai menjalankan roda pemerintahannya dengan warisan kemiskinan yang tinggi, akan tetapi seiring waktu situasi politik bisa dikendalikan dan mulai stabil kembali. Setelah itu muncullah kebijakan pelita (pembangunan lima tahun). Pelita adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

3. Program pemberdayaan masyarakat di pedesaan pemerintah era reformasi. Berikut ini program pengentasan kemiskinan era presiden Habibie:

- a. Jaring Pengaman Sosial (JPS)
- b. Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
- c. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
- d. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
- e. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

4. Program pemberdayaan masyarakat di pedesaan pemerintah era demokrasi

Dengan permasalahan yang luas dan kompleks kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sesuai dengan Perpres 15 tahun 2010 pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan.

a. Klaster 1

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 3) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
- 5) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

b. Klaster 2

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- 2) Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Negara Berkembang

Pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pemberdayaan pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan.

1. Program Pembangunan Pertanian (*Agricultural Development*)

Pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian bangsa. Sektor pertanian telah berperan dalam pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar melalui peningkatan *input-output-outcome* antar industri, konsumsi, dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional ataupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian.

Implementasi program pembangunan pertanian telah merombak sistem pertanian dan model usaha tani. Oleh karena itu, lahir sebutan *green revolution* (revolusi hijau). Di Indonesia, program pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru secara intensif pada Pelita I telah membuahkan hasil yang spektakuler. Indonesia yang semula tergolong pengimpor beras nomor satu di dunia menjadi negara berswasembada pangan. Beberapa negara berkembang lainnya juga mengalami hal serupa. Secara politis, kondisi ini sangat menguntungkan negara berkembang, karena tidak ada kebergantungan pangan pada negara-negara maju.

Pada beberapa negara berkembang, revolusi hijau juga telah menciptakan disparitas regional, karena teknologi yang hadir bersama pembangunan pertanian lebih dapat berkembang di sawah-sawah dengan sistem irigasi yang baik daripada sawah tadah hujan atau tanah kering. Produksi hasil usaha tani di desa-desa dengan sawah tadah hujan dan tanah kering lebih rendah dibandingkan dengan di desa-desa dengan sawah yang beririgasi baik. Dengan demikian, desa-desa dengan sawah yang beririgasi baik lebih diuntungkan oleh program pembangunan pertanian tersebut.

2. Industrialisasi Pedesaan (*Rural Industrialization*)

a. Pengertian industrialisasi desa

Industrialisasi pedesaan merupakan kata kunci dari ekonomi kerakyatan. Dengan industrialisasi, kualitas dan produktivitas terjaga, sehingga desa mampu bersaing di dalam sistem ekonomi yang modern. Konsep industrialisasi pedesaan diperkenalkan sebagai pemikiran alternatif untuk menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi desa, khususnya sejak terjadi kegagalan transformasi ekonomi pada zaman revolusi hijau. Landasan pengembangan industrialisasi pedesaan didasarkan pada model transformasi teknologi dan pengetahuan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Industrialisasi desa ditandai oleh kepekaan pada pengelolaan lingkungan, orientasi padat karya dan bukan padat modal, penggunaan teknologi menengah, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang (*sustainable*). Industrialisasi pedesaan memiliki dua pengertian yang secara konseptual berbeda, yaitu sebagai berikut.

- 1) Industri di pedesaan (*industry in rural areas*), yaitu pembangunan pabrik-pabrik yang mengambil lokasi di kawasan pedesaan. Dari pengertian ini, pedesaan hanya merupakan wahana untuk memproduksi barang dan jasa dengan investor pihak lain yang dapat berasal hanya dari luar pedesaan tersebut.

- 2) Industri yang mengandalkan kekuatan utama berupa sumber daya yang ada di pedesaan (industry of rural areas), baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Merujuk pada pengertian ini, industri merupakan kekuatan yang datang dari dalam pedesaan itu sendiri (*indigineous industry*).

b. Tujuan industrialisasi desa

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini diyakini cukup cerah karena alasan-alasan berikut:

- 1) Persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif;
- 2) Kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata ke segenap lapisan masyarakat;
- 3) Bahan baku produksi mudah didapat atau tersedia di desa sehingga biaya produksi dapat diminimalisasi;
- 4) Dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produktif lainnya (sambil bertani).

3. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (*Integrated Rural Development*)

a. Pengertian Masyarakat Desa Terpadu

Pembangunan desa terpadu dapat dipahami sebagai strategi yang mengadopsi *system approach* dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Strategi ini memandang bahwa sektor ekonomi berperan dalam pembangunan, sedangkan sektor politik, pendidikan, lingkungan, sosial, kultural, psikologis, merupakan teknik yang saling terintegrasi, berinterpendensi, dan saling mendukung. Dengan melihat karakteristik tersebut, untuk mengembangkan konsep pembangunan terpadu tidak cukup menggunakan satu kontribusi dari satu disiplin ilmu pengetahuan, tetapi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang relevan dan berkaitan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam proses pembangunan desa tersebut. Sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya mengandung berbagai aspek, proses yang menggunakan pendekatan ini akan mengandung unsur-unsur yang sangat esensial berupa multifungsi, intersektoral, dan interaksi.

Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai metode, proses, dan sasaran dari proses itu sendiri. Sebagai suatu metode, pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai suatu proses, pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan desa yang berorientasi tradisional menuju kehidupan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, proses ini menggunakan pendekatan yang menuju pada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan

diri, pengembangan institusi sosial ekonomi, dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.

b. Tujuan

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston dalam Sunyoto Usman, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan masyarakat desa terpadu, yaitu:

- 1) Pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*);
- 2) Memperluas kesempatan kerja;
- 3) Intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan;
- 4) Mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- 5) Mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan;
- 6) Membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multisektor.

4. Strategi Pusat Pertumbuhan (*Growth Centre Strategy*)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program pembangunan pedesaan yang telah dibahas (terutama program pembangunan masyarakat desa terpadu) adalah ruang. Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memerhatikan keberkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Oleh sebab itu, berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek, tanpa memerhatikan jarak ideal dengan kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi.

Strategi pusat pertumbuhan adalah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini. Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produser, atau lazim disebut dengan *the centres of demonstration effect of consumer goods*. Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi gambling dalam mengembangkan usaha.

BAB VII MASYARAKAT KOTA

A. Pendahuluan

Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Lahirnya peradaban sebuah kota serta perkembangan pemukiman dalam bentuk kota diketahui muncul pada masa Neolitikum yang berlangsung sekitar 5.500-7.500 tahun lalu. Sebelum masa tersebut, pemukiman manusia bersifat sementara karena harus mengikuti gerak hewan buruan, serta alasan menghindari musim yang keras (Eko A. Meinarno, 2011: 220). Bentuk huniannya adalah rumah di atas pohon atau gua. Setelah ada upaya manusia untuk melakukan pembudidayaan tetumbuhan dan domestikasi hewan, pemukiman yang bersifat permanen mulai muncul. Hal ini didukung fakta dengan ditemukannya area pertanian awal di Timur Tengah, Cina, Amerika Selatan, dan Asia Barat Daya dengan usia yang sama dengan masa Neolitikum (Eko A. Meinarno, 2011: 220).

Daerah-daerah pertanian tersebut membuka peluang untuk proses saling bertukar hasil produksi di suatu tempat yang akan menjadi kota. Pertukaran ini berlangsung dalam keadaan produksi yang sudah berlebih (surplus) maupun kurang lengkap. Sebagai contoh, ada bahan makanan yang kurang dan dapat disediakan oleh kelompok lain, kelompok yang membutuhkan harus datang membawa hasil lebih dari pertanian atau ternaknya untuk ditukar. Dengan adanya kegiatan pertukaran, hasil produksi berkembang menjadi transaksi jual beli.

Terbentuknya pemukiman masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar, padat, dan beragam merupakan ciri peradaban manusia yang maju. Dengan demikian, kota pada akhirnya suatu ciptaan peradaban umat manusia yang lahir dari pedesaan. Pedesaan merupakan ibu yang melahirkan sebuah perkotaan. Kota adalah pemukiman baru bagi warga desa yang tinggal di perkotaan. Sebab orang-orang kota pada mulanya adalah orang-orang pedesaan. Orang-orang desa lebih bersifat sama (homogen), sedangkan setelah pindah ke tempat lain (kota), lebih bersifat campuran (heterogen) sebab orang yang pindah ke kota, tidak berasal dari satu desa tetapi dari banyak desa, yang ingin bermukim.

B. Pengertian Kota

Kota berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu “kota” yang dalam ungkapan lain disebut sebagai kita atau kuta. Berdasarkan kamus Bahasa Sangsekerta-Indonesia dan Sangsekerta-Inggris, kota berarti kubu atau perbentengan (stronghold) (Eko A. Meinarno, 2011: 221). Adapun dalam literatur Anglo-Amerika, terdapat dua istilah untuk memaksudkan “kota”, yaitu “town” dan “city”. Dalam bahasa Indonesia, “town” cenderung disepadankan dengan “kota kecil”, sedangkan “city” diartikan dengan “kota besar” (S. Menno dan Mustamin Alwi, 1992: 26). a. Definisi kota yang agak komplet (representatif) dijelaskan oleh Wirth (Safari Imam, 1993: 19), kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduknya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kawasan perkotaan kecil, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa
2. Kawasan perkotaan sedang, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa
3. Kawasan perkotaan besar, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa
4. Kawasan perkotaan metropolitan, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

Berikut ini adalah data tentang kota-kota di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa (sensus penduduk tahun 2010).

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Kota-kota di Indonesia

Ranking	Nama Kota	Provinsi	Jumlah Penduduk
1.	Jakarta	Jakarta	9.586.705
2.	Surabaya	Jawa Timur	2.765.487
3.	Bandung	Jawa Barat	2.394.873
4.	Bekasi	Jawa Barat	2.334.871
5.	Medan	Sumatera Utara	2.097.610
6.	Tangerang	Banten	1.798.601
7.	Depok	Jawa Barat	1.738.570
8.	Semarang	Jawa Tengah	1.520.481
9.	Palembang	Sumatera Utara	1.440.678
10.	Makassar	Sulawesi Selatan	1.331.391
11.	Tangerang Selatan	Banten	1.290.322
12.	Bogor	Jawa Barat	950.334
13.	Batam	Kepuluawan RiauPekan	917.998
14.	Pekanbaru	Riau	882.045
15.	Bandar Lampung	Lampung	881.801
16.	Malang	Jawa Timur	820.243
17.	Padang	Sumatera Barat	799.750
18.	Denpasar	Bali	788.589
19.	Samarinda	Kalimantan Timur	685.859
20.	Bnajarmasin	Kalimantan Selatan	612.849
21.	Serang	Banten	611.897
22.	Tasikmalaya	Jawa Barat	578.046
23.	Pontianak	Kalimantan Barat	554.764
24.	Cimahi	Jawa Barat	541.177
25.	Balikpapan	Kalimantan Selatan	526.508
26.	Jambi	Jambi	515.901
27.	Surakarta	Jawa Tengah	499.337
28.	Mataram	Nusa Tenggara Barat	402.843
29.	Manado	Sulawesi Barat	394.683
30.	Yogyakarta	Yogyakarta	388.627
31.	Cilegon	Banten	360.125
32.	Kupang	Nusa Tenggara Timur	315.768
33.	Palu	Sulawesi Tengah	310.168
34.	Ambon	Maluku	305.984

35.	Tarakan	Kalimantan Utara	301.398
36.	Cirebon	Jawa Barat	296.389
37.	Bengkulu	Bengkulu	296.378
38.	Pekalongan	Jawa Timur	274.839
39.	Kediri	Jawa Tengah	268.507
40.	Tegal	Jawa Tengah	239.599
41.	Binjai	Sumatera Utara	235.450
42.	Pematang Siantar	Sumatera Utara	234.698
43.	Jayapura	Papua	233.859
44.	Banda Aceh	Aceh	223.446
45.	Palangkaraya	Kalimantan Tengah	200.608
46.	Probolinggo	Jawa Timur	196.957
47.	Banjarbaru	Kalimantan Selatan	192.309
48.	Pasuruan	Jawa Timur	186.262
49.	Tanjungpinang	Kepulauan Riau	177.396
50.	Gorontalo	Gorontalo	173.951
51.	Dumai	Riau	173.866
52.	Madium	Jawa Timur	170.964
53.	Batu	Jawa Timur	170.948
54.	Salatiga	Jawa Tengah	170.332
55.	Pangkalpinang	Bangka Belitung	162.930
56.	Lubuklinggau	Sumatera Selatan	158.824
57.	Ternate	Maluku Utara	158.418
58.	Bitung	Sulawesi Utara	155.385
59.	Tanjungbalai	Sumatera Utara	154.445
60.	Tebingtinggi	Sumatera Utara	145.248
61.	Metro	Lampung	145.248
62.	Bontang	Kalimantan Timur	140.238
63.	Padang Sidempuan	Sumatera Utara	136.275
64.	Blitar	Jawa Timur	131.968
65.	Lhokseumawe	Aceh	129.251
66.	Singkawang	Kalimantan Barat	128.297
67.	Parepare	Sulawesi Selatan	125.207
68.	Langsa	Aceh	124.270
69.	Banjar	Jawa Barat	123.341
70.	Prabumulih	Sumatera Selatan	121.137
71.	Mojokerto	Jawa Timur	120.196
72.	Magelang	Jawa Tengah	118.227
73.	Sorong	Papua Barat	118.017
74.	Palopo	Sulawesi Selatan	116.152
75.	Bima	Nusa Tenggara Barat	112.130
76.	Bukittinggi	Sumatera Utara	111.312
77.	Bau-bau	Sulawesi Tenggara	106.63

Sumber: Data BPS, Sensus Penduduk Tahun 2010

Daldjoeni (1997: 44-45) mengatakan bahwa kota pada awalnya bukanlah tempat pemukiman, melainkan pusat pelayanan. Sejauh mana kota menjadi pusat pelayanan bergantung pada sejauh mana pedesaan sekitarnya memanfaatkan jasa-jasa kota. Sjoberg dalam Daldjoeni (1997: 30) melihat lahirnya kota lebih dari timbulnya suatu golongan spesialisasi nonagraris, bahwa orang yang berpendidikan merupakan bagian penduduk yang terpenting.

Pusat kota adalah titik atau tempat atau daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala pelayanan kegiatan kota, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi (Hadi Yunus, 2002: 107). Semakin luas suatu kota, semakin besar “beban” yang ditanggung oleh pusat kota. Hal tersebut berdampak langsung terhadap perkembangan pemanfaatan lahan yang semakin terbatas di pusat kota, maka dari itu perlu diketahuinya mengenai pusat pertumbuhan kota.

Wirth dalam Daldjoeni (1997: 29) merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Bintarto (1984: 36) menjelaskan bahwa kota adalah jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Hadi Yunus (2005: 40) menjelaskan definisi kota dalam enam tinjauan terhadap kota, di antaranya:

1. Tinjauan dari segi yuridis administratif
2. Segi fisik morfologis
3. Jumlah penduduk
4. Kepadatan penduduk
5. Fungsi dalam suatu wilayah organik
6. Segi sosial-kultural

Dilihat dari segi fisik, kota di definisikan sebagai suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan yang mempunyai sarana-sarana dan prasarana-prasarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduknya. Dari segi jumlah penduduk, kota didefinisikan berdasarkan kesepakatan mengenai jumlah minimum populasi yang dapat digunakan untuk mengualifikasikan pemukiman sebagai suatu kota. Karena sulit mencapai kesepakatan, kota dapat dilihat pada cirinya, yaitu:

1. Peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam kehidupan ekonomi
2. Jumlah penduduk yang relatif besar
3. Heterogenitas susunan penduduknya
4. Kepadatan penduduk yang relatif besar

C. Sejarah dan Perkembangan Kota

Proses pembentukan kota tidak lepas dari segala aspek aktivitas manusia. Banyak kota di dunia berawal dari desa. Desa adalah pemukiman yang penghuninya terikat dalam kehidupan dan bergantung pada wilayah di sekelilingnya. Dalam perjalanan waktu, karena adanya topografis dan lokasinya, desa berkembang menjadi kota (pemekaran kota). Kemudian sejarah terbentuknya sebuah kota yang berada di suatu negara biasanya bervariasi, tetapi memiliki inti yang sama. Terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antar penduduk desa dengan penduduk di sekitar desa itu baik untuk transaksi keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau tukar menukar barang. Gideon Sjoberg dalam S. Meno

dan Mustamim Alwi menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan pergerakan manusia hingga menuju masyarakat kota, di antaranya:

1. Preurban feudal Society, yaitu masyarakat feudal sebelum adanya atau menjadi kota
2. Preindustrial Feudal Society, yaitu masyarakat feudal sebelum adanya industri
3. Modern Industrial Feudal Society, yaitu masyarakat feudal dengan industry maju

JH. De Goode dalam S. Meno dan Mustamin Alwi menjelaskan sebuah masyarakat berkembang menjadi kota apabila memiliki beberapa faktor seperti:

1. Jumlah penduduk keseluruhan
2. Penguasaan atas alam lingkungan
3. Kemajuan teknologi
4. Kemajuan dalam organisasi sosial Kota-kota di Indonesia memiliki sejarah dan perkembangannya tersendiri.

Menurut Koentjaningrat dalam S. Meno dan Mustamin Alwi menjelaskan bahwa kota-kota di Indonesia bermula dari adanya kota-kota istana, kemudian kota pusat keagamaan, dan kota pelabuhan. Kemudian juga muncul pula kota administrasi. Menurut Branch, beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota, yaitu:

1. Keadaan geografis, yaitu pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota.
2. Tapak, merujuk pada topografi kota.
3. Fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut.
4. Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota.
5. Unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang turut memengaruhi perkembangan kota.

Menurut Catanese, faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik maupun nonfisik. Faktor-faktor fisik akan memengaruhi perkembangan suatu kota di antaranya:

1. Faktor lokasi. Faktor lokasi di mana kota itu berada akan sangat memengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya.
2. Faktor geografis. Kondisi geografis suatu kota akan memengaruhi perkembangan kota, kota yang memiliki geografis yang relative datar lebih cepat berkembang dibandingkan dengan kota di daerah bergunung-gunung.

Adapun faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa, yaitu:

1. Faktor perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal). Perkembangan secara alami berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang terjadi di kota tersebut, sedangkan migrasi berkaitan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke dalam kota sebagai urbanisasi.
2. Faktor aktivitas kota. Kegiatan yang ada di dalam kota, terutama kegiatan perekonomian.

Dari waktu ke waktu, perkembangan kota terus berubah. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta meningkatnya jumlah kebutuhan

kehidupan, meningkat pula kebutuhan ruang perkotaan yang besar. Karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, meningkatnya kebutuhan akan mengambil ruang di pinggiran kota. Kota juga sebagai pusat pemerintahan pada umumnya banyak ditemukan pada zaman sebelum Revolusi Industri. Kebanyakan kota ini merupakan kota lama bekas kerajaan yang mampu bertahan sebagai ibukota sampai pada zaman modern. Pada zaman modern, kota menjadi pusat industry, produksi, dan jasa. Pada dasarnya, kota terbentuk karena diikuti dengan kepadatan penduduknya. Penyebab kepadatan penduduk terjadi karena ada aktivitas tertentu yang menyebabkan orang-orang berdatangan. Memang dari sudut karakter, perkembangan dan pertumbuhan kota-kota yang semakin besar, menunjukkan berbagai karakter pada kota-kota tersebut. Kota metropolitan atau kota primat, yaitu kota yang sangat besar, misalnya cenderung memperlihatkan watak parasitismenya terhadap masyarakat nasional, dan berusaha menarik bagian modal yang relative besar sehingga dapat menjadi hambatan bagi pedesaan maupun kota-kota yang lebih kecil.

D. Fungsi Kota

Kota berfungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri dan kebudayaan. Pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi dan manufaktur. Untuk melakukan fungsi tersebut, kota perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti kawasan permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri, sarana kebudayaan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Menurut Hatt dan Reiss (1959) bahwa adanya kota untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk yang selalu berkembang. Hal ini untuk mendukung dan melayani fungsi-fungsi kota yang saling memengaruhi, yaitu sebagai berikut.

1. Pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota model ini menjadi ruang produktif yang luas.
2. Pusat penyedia transportasi merupakan break-of-bulk. Transportasi kota sebagai break-of-bulk, merupakan pelayanan sepanjang rute transportasi mencapai daerah-daerah terpencil pun dapat dilalui dengan mudah karena letak jalur transportasi kota yang strategis
3. Titik konsentrasi pelayanan khusus. Fungsi kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus, antara lain sebagai tempat perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan tempat menjamu tamu dari kota lain dan sebagainya.

Lapisan masyarakat di dalam perkotaan sangat beragam, begitu juga dengan bangunannya. Oleh sebab itu, kota dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang di mana bangunan dan lapisan masyarakatnya sudah menjadi satu kesatuan. Kota itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang sangat potensial dari segi manapun, mulai dari sektor pekerjaan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu, di dalam suatu perkotaan kita pasti mudah menemukan berbagai macam hal karena fasilitas-fasilitas di perkotaan lebih banyak bila dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas pedesaan.

Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di dalam kota akan terlihat lebih padat karena jumlah penduduk di kota lebih banyak. Tak hanya itu, bangunan yang ada di kota juga lebih sering vertikal, sehingga kita akan melihat gedung-gedung tinggi. Bahkan, teknologi yang ada di kawasan perkotaan akan terlihat lebih modern

mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kawasan perkotaan sering dijadikan sebagai pusat ekonomi suatu pemerintahan. Sama halnya pengertian kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemindahan ibukota pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

E. Struktur Perkembangan Kota

Struktur adalah susunan (fisik atau nonfisik) yang bersatu secara teratur atau tatanan yang menunjukkan keterkaitan antarbagian dan memperlihatkan sifat . struktur kota adalah tatanan beberapa bagian yang menyusun suatu kota yang menunjukkan keterkaitan antar bagian. Penjabaran struktur kota membentuk pola kota yang menginformasikan kesesuaian lahan, kependudukan, guna lahan, sistem transportasi, dan sebagainya. Yang semua berkaitan satu dengan lainnya.

Menurut Bourne (1982), kota dapat diketahui lebih lanjut dari struktur tata ruangnya. Struktur kota terbentuk dari 3 kombinasi elemen berikut :

1. Bentuk kota, yaitu pola atau penataan ruang dari tiap-tiap elemen kota. Seperti bangunan dan penggunaan lahan, kelompok social, kegiatan ekonomi dan kelembagaan di dalam kota.
2. Interaksi dalam kota, terbentuk dari sejumlah hubungan kaitan dan aliran pergerakan yang mengintegrasikan elemen-elemen dalam kota tersebut.
3. Mekanisme pengaturan yang ada didalam kota, merupakan mekanisme yang menghubungkan kedua elemen sebelumnya kedalam struktur kota yang berbeda. Misalnya berdasarkan penggunaan lahan dan aliran pergerakan dalam kota yang terbentuk mekanisme harga lahan yang berbeda-beda didalam kota.

Herbert dalam Hadi Yunus mengemukakan tiga model klasik berkaitan dengan struktur kota yang dibedakan menjadi teori zona konsentris, teori sektoral dan konsep multiple-nuclei. Secara umum, model-model tersebut menjelaskan tata guna lahan yang mungkin terbentuk didalam perkembangan suatu kota.

1. Teori Zona Konsentris

Teori konsentris merupakan sebuah teori mengenai perencanaan kota dan pembagian wilayah yang mana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran yang membentuk sebuah pola lingkaran atau seperti sebuah gelang. Teori konsentris pertama dicetuskan oleh Ernest W. Burgess yang berprofesi sebagai seorang sosiolog asal amerika. Karakteristik setiap zona dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Zona 1: daerah pusat kegiatan (DPK) atau central business district (CBD) yaitu wilayah yang menjadi pusat komersial dan bisnis kota. Di kota-kota besar, central business district sering identic dengan distrik keuangan kota. Secara geografis, sering bertepatan dengan pusat kota. Secara konsep dasar, central business district memiliki dua bagian utama yaitu sebagai Retail Business District (RBD) dan Whole Business District (WBD). Contohnya toko-toko besar, bangunan kantor, bank, rumah makan, pusat bisnis, dan sebagainya.
- b. Zona 2: Daerah peralihan atau transition zone yaitu daerah ini terkait dengan zona pusat daerah kegiatan. Penggunaannya campuran antara pusat usaha dengan permukiman. Masyarakat yang tinggal di daerah peralihan ekonominya tergolong miskin. Dalam perencanaan pembangunan kota, zona

ini diubah menjadi kompleks perhotelan, parkir dan jalan utama yang menghubungkan dengan daerah luarnya.

- c. Zona 3: Perumahan para pekerja bebas yaitu zona ini paling banyak ditempati oleh pekerja-pekerja. Baik pekerja pabrik ataupun industry. Diantaranya adalah pendatang baru dari zona 2. Yang menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya.
- d. Zona 4: permukiman lebih baik. Yaitu zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah-tinggi. Walaupun tidak berstatus ekonomi sangat baik, kebanyakan dari mereka yaitu usaha kecil-kecilan, para professional, para pegawai dan sebagainya. Kondidi ekonomi umumnya stabil sehingga lingkungan permukimannya menunjukkan tingkat keteraturan yang cukup tinggi. Fasilitas permukiman terencana dengan baik, sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada zona ini.
- e. Zona 5: penglaju atau commuter zone yaitu wilayah geografis yang digunakan dalam analisis populasi dan ekonomi. Selain penggunaan utama daerah perkotaan, ini dapat digunakan untuk mendefenisikan daerah pedesaan yang berbagi pasar bersama.

2. Teori Sektoral

Teori sektoral sendiri dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Dimana dalam kajian pembahasannya, teori sektoral merupakan berbagai unit kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak mengikuti zona teratur secara konsentris, namun membentuk berbagai sector yang memiliki sifat lebih bebas. Secara garis besar, zona yang ada dalam teori sector dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Zona 1: central business district (CBD). Yaitu merupakan pusat kota yang relative terletak ditengah kota yang berbentuk bundar.
- b. Zona 2: wholesale light manufacturing yaitu pusat kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik kota sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan social, ekonomi, politik dan budaya. Daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman, terdapat pemukiman kumuh dan kriminalitas tinggi. Terdiri atas industry kecil dan perdagangan. Zona yang dihuni oleh penduduk yang status ekonominya menengah keatas, dengan kondisi ekonomi pada zona ini lebih stabil bila disbanding dengan zona lainnya. Daerah ini merupakan pusat dari semua kegiatan manusia di kota dan sebagian penduduknya merupakan penglaju.
- c. Zona 3: pemukiman kelas rendah yaitu zona yang dihuni oleh penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lemah.
- d. Zona 4: permukiman kelas menengah yaitu taraf kondisi kondidi kemampuan ekonomi yang menanjak dan semakin mapan. Kelompok permukiman baru akan membentuk sector tersendiri.
- e. Zona 5: permukiman kelas tinggi yaitu daerah yang menjanjikan kepuasan, kenyamanan bertempat tinggal. Penduduk dengan penghasilan tinggi mampu membangun tempat hunian yang sangat mahal atau mewah.

3. Teori pusat berganda

Teori pusat berganda yaitu pertumbuhan sebuah kota mulai dari pusat, berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Bentuk kompleks ini disebabkan oleh munculnya nucleus atau inti baru yang berperan sebagai kutub pertumbuhan. Zona-zona keruangan pada teori pusat berganda ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Zona 1: central business district (CBD). Yaitu zona yang merupakan pusat fasilitas transportasi dan didalamnya terdapat district spesialisasi pelayanan seperti retailing distrik khusus perbankan, pusat hiburan dan lain-lain.
- b. Zona 2: wholesale light manufacturing. Yaitu karena keberadaan fungsi sangat membutuhkan jasa angkutan besar, fungsi ini banyak mengelompok sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD.
- c. Zona 3: permukiman kelas rendah yaitu permukiman yang membutuhkan syarat khusus. Dalam hal ini ada persaingan mendapatkan lokasi yang nyaman antar golongan berpenghasilan tinggi dan golongan berpenghasilan rendah.
- d. Zona 4: permukiman kelas menengah yaitu zona yang tergolong lebih baik daripada zona 3. Baik dari segi fisik maupun penyediaan fasilitas kehidupannya.
- e. Zona 5: permukiman kelas tinggi yaitu zona yang kondisinya paling baik untuk permukiman dalam arti fisik maupun penyediaan fasilitas. Lingkungan alamnya juga menjanjikan kehidupan yang tenang, aman, sehat dan menyenangkan.
- f. Zona 6: heavy manufacturing yaitu merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar. Permukiman yang dekat dengan zona ini biasanya mengalami berbagai permasalahan lingkungan. Seperti pencemaran, kebisingan dan sebagainya.
- g. Zona 7: business district yaitu zona yang muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona 4 dan 5 dan sekaligus menarik fungsi-fungsi lain untuk berada didekatnya sebagai salah satu pusat zona.
- h. Zona 8: tempat tinggal daerah pinggiran (suburban) yaitu zona yang membentuk komunitas tersendiri dalam arti lokasinya. Zona ini digunakan untuk tempat tinggal semata.
- i. Zona 9: industry daerah pinggiran (suburban). Yaitu zona yang dijangkau oleh jalur transportasi yang memadai sebagai salah satu pusat zona.

F. Kota Sebagai Masyarakat Modern

Masyarakat perkotaan sering diidentikkan dengan masyarakat modern (maju) dan dipertentangkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat tradisional terutama dilihat dari aspek budayanya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (desawi) dengan masyarakat perkotaan (kotawi). Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, seberapa pun kecilnya desa, pasti ada pengaruh dari kota. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit untuk memberikan batasan yang dimaksudkan dengan perkotaan karena adanya hubungan konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.

1. Aspek Fisik Kota

Pada aspek fisik ini, Daldjoeni lebih melihat pada aspek struktur sosial kota yang dapat diperinci dalam beberapa gejala sebagai berikut.

- a. *Heterogenitas sosial*. Kepadatan penduduk mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang. Orang dalam bertindak memilih-milih mana yang

paling menguntungkan baginya, sehingga tercapai spesialisasi. Demi berhasilnya kapilaritas sosial (membuat karier), orang mengurangi jumlah anak dalam keluarga. Kota juga merupakan melting pot bagi aneka suku ataupun ras. Masing-masing minoritas ada kecenderungan untuk mempertahankan diri dengan memelihara jumlah anak yang banyak untuk tidak hilang terdesak.

- b. *Hubungan sekunder*. Jika hubungan antarpenduduk di desa disebut primer, hubungan antarpenduduk di kota disebut sekunder. Pengenalan dengan orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Ini karena tempat tinggal juga cukup terpencar dan saling mengenal hanya menurut perhatian antarpihak.
- c. *Kontrol (pengawasan sekunder)*. Di kota orang tidak memedulikan perilaku pribadi sesamanya. Meskipun ada kontroi sosial, sifatnya nonpribadi. Selama tidak merugikan bagi umum, tindakan dapat ditoleransikan.
- d. *Toleransi sosial*. Orang-orang kota secara fisik berdekatan, tetapi secara sosial berjauhan. Dapat saja di sini orang berpesta dan pada saat yang sama tetangga menangisi orang mati.
- e. *Mobilitas Sosial*. Di sini yang dimaksudkan adalah perubahan status sosial seseorang. Orang menginginkan kenaikan dalam jenjang kemasyarakatan (*social climbing*). Dalam kehidupan kota, segalanya diprofesionalkan, dan melalui profesinya orang dapat naik posisinya. Selain usaha dan perjuangan pribadi untuk berhasil, secara kelompok seprofesi juga ada solidaritas klas. Terjadilah perkumpulan-perkumpulan orang seprofesi, seperti guru, dokter, wartawan, pedagang, tukang becak, dan lainnya.
- f. *Ikatan sukarela (voluntary association)*. Secara sukarela orang menggabungkan diri ke dalam perkumpulan yang disukainya, seperti sport, aneka grup musik, klub filateli, perkumpulan filantropi. Meskipun sifatnya serba sukarela, ada pula gejala bahwa berbagai perkumpulan bersaing mencari anggota melalui teknik memikat dan propaganda, misalnya partai politik, gerakan anti merokok, gerakan keluarga berencana.
- g. *Individualisasi*. Ini merupakan akibat dari sejenis atomisasi. Orang dapat memutuskan apa-apa secara pribadi, merencanakan kariernya tanpa desakan orang lain. Ini berlatar belakang corak sekunder dari kehidupan kota, sifat sukarelanya ikatan dan banyaknya kemungkinan yang tersedia.
- h. *Segregasi keruangan (spatial segregation)*. Akibat kompetisi ruang terjadi pola sosial yang berdasarkan persebaran tempat tinggal atau sekaligus kegiatan sosial-ekonomis. Ini distudi oleh ekologi manusia (*human ecology*). Terjadilah pemisahan (*segregation*) berdasarkan ras.

2. Aspek Mental Kota

- a. *Atomisasi dan pembentukan massa*. Dalam kota besar, manusia menjadi sendirian seperti suatu atom di dalam massa yang terdiri atas atom-atom. Kota hanya dapat menerima manusia sebagai atom, itu di dalam proses pembentukannya. Kota berusaha melayani manusia sebagai massa melalui perkunjungan bioskop, pertandingan sepak bola, penerbitan koran, penjualan kaset musik, dan sebagainya.
- b. *Kepekaan terhadap rangsangan dan sikap masa bodoh*. Untuk teliti diperlukan konsentrasi yang sungguh-sungguh, sedangkan waktu tidak ada. Jika waktu diadakan untuk itu semua, ia bingung karena tidak mampu menahan beban jiwani. Akibat kedua dari keterbukaan terhadap rangsangan

yang terus meningkat adalah sikap masa bodoh. Berbagai rangsangan itu menjadikan orang kota tidak peka lagi. Ketidakpekaannya berbeda dengan yang ada pada petani di pedesaan. Petani tidak peka terhadap rangsangan yang disajikan oleh kota karena ia tidak mudah bereaksi atasnya. Itu semuanya hanya akan menjadikan ia lelah dan bingung. Sebaliknya, bagi orang kota, rangsangan-rangsangan itu semua harus menjadi kebiasaan baginya. Lama kelamaan, menjadi tidak terasa lagi, dan orang bersikap masa bodoh terhadapnya dan minuman yang me-mancing selera menikmatinya, ia tergugah lagi oleh rangsangan tersebut.

- c. *Egalisasi dan sensasi*. Proses egalisasi mengandung tendensi penyamaan, yang di dalamnya peranan uang sangat penting dalam kehidupan kota. Ini berlatar belakang pada proses tehnisi dan industrialisasi. Dengan memiliki uang, orang dapat menyamai orang lain. dalam arti ia dapat membeli apa saja yang diinginkannya. Hidup perkotaan berisi kecendrungan sensasi, karena kepekaan manusia menjadi semakin luntur seperti disebutkan di atas. Hal-hal yang menimbulkan sensasi.
- d. *Industri kesenangan dan pengisian waktu luang*. Semakin maju suatu kota besar, semakin bermunculan masalah yang bertalian dengan penggunaan waktu luang. Waktu luang ini ditimbulkan oleh proses teknisasi sehingga sebagian besar tenaga manusia tergantikan oleh mesin dan tata kerja manusia dapat dijadwal secara ketat. Akibatnya, manusia bekerja dengan penuh ketegangan sehingga setelah selesai diperlukan suasana yang mengandung santai. Waktu luang akan menjadi masalah penting setelah bersama dengan majunya teknisasi, jumlahnya makin bertambah.

3. Tindakan-tindakan Sosial

Dalam masyarakat tradisional, tindakan-tindakan sosial (*social action*) lebih bersandar pada kebiasaan atau tradisi, atau *prescribed action*. Adapun dalam masyarakat modern, tindakan tindakan sosial akan lebih banyak bersifat pilihan. Oleh karena itu, salah satu ciri yang terpenting dari masyarakat modern adalah kemampuan dan hak masyarakat untuk mengembangkan pilihan dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri. Misalnya, dalam masyarakat tradisional atau pramodern, seorang anggota keluarga mengikuti jejak pekerjaan orangtuanya. Bahkan, dalam masyarakat yang lebih tradisional tidak dimungkinkan menerobos sekat-sekat sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, pilihan-pilihan lebih terbuka.

4. Orientasi terhadap Perubahan

Dalam masyarakat pramodern, perubahan berjalan lambat. Dalam masyarakat praagraris perubahan bahkan hampir tidak terjadi selama ribuan tahun. Makin maju masyarakat makin cepat perubahannya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang senantiasa berubah cepat, bahkan perubahan itu melembaga. Perubahan ini merupakan ciri tetapi sekaligus masalah yang senantiasa dihadapi masyarakat modern, karena frekuensinya yang makin cepat, sehingga acapkali tidak bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, maka terjadi ketegangan-ketegangan dan bahkan disintegrasi dalam masyarakat yang lebih berat bebannya dan lebih traumatis akibatnya dibandingkan dengan pada masyarakat tradisional yang langka perubahan. Perubahan itu sendiri didorong dan

dipercepat oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang sepertinya roda percepatannya bergerak dengan intensitas yang makin tinggi.

5. Berkembangnya Organisasi dan Diferensiasi

Suatu masyarakat modern, dalam pengertian yang dewasa ini banyak dianut harus tercermin dalam berbagai aspek berikut.

a. Sistem Ekonomi

Masyarakat modern lebih berorientasi pada ekonomi modern dan efisiensi (maksimum atau optimum). Ciri utamanya adalah kemampuan untuk memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan (*self sustaining growth*). Mekanisme ekonomi modern adalah pasar. Sistem ekonomi tersebut memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, memiliki daya yang memungkinkan pengembangan dan penyerapan teknologi (atau gagasan-gagasan) baru. Peran industri dan jasa lebih besar dibandingkan pertanian. Oleh karena itu, proses modernisasi acap disinonimkan dengan industrialisasi. Kegiatan-kegiatan yang sarat modal dan teknologi yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, lebih besar dibandingkan dengan yang sarat tenaga kerja yang berharga murah. Dengan demikian, organisasi dan manajemen produksi menjadi wahana yang penting dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, kemampuan (dan options) negara untuk mengadakan intervensi menjadi makin berkurang. Sistem ekonomi modern bersifat mandiri. Mandiri tidak berarti keterisolasian karena dalam hubungannya dengan ekonomi-ekonomi lainnya, ekonomi yang modern mempunyai keunggulan yang membuatnya memiliki kekuatan tawar-menawar ("*bargaining position*") dalam hubungan saling kebergantungan antarekonomi. Dengan demikian, ekonomi yang modern bukan merupakan "*vassal*" dari ekonomi lainnya.

b. Sistem Politik

Sistem politik modern juga mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan sistem tradisional atau pramodern, antara lain, individu dan masyarakat tidaklah merupakan objek, tetapi subjek yang turut menentukan arah kehidupan. Berkaitan dengan itu, masyarakat modern ditandai oleh partisipasi masyarakat yang luas dalam proses politik. Sistem politiknya, yaitu nilai-nilai dasar dan instrumental, organisasi, mekanisme dan prosedur, bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh siapa pun. Sistem politik modern berlandaskan aturan dasar yang disepakati bersama, yang disebut konstitusi, dan kehidupan diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama pula dan berlaku buat semua secara adil. Oleh karena itu, negara modern adalah negara yang berdasarkan hukum. Rakyat adalah yang berdaulat, dan mekanisme yang menunjukkan kedaulatan itu, diwujudkan melalui perwakilan. Proses itu berjalan secara terbuka dan menjamin hak setiap warga untuk turut serta di dalamnya sehingga dilengkapi oleh mekanisme komunikasi sosial yang efektif. Penyelenggara negara tunduk pada kedaulatan rakyat dan hukum, seperti juga semua warga negara.

c. Sistem Sosial

Dalam masyarakat modern, hubungan primer antarindividu telah jauh berkurang dan hubungan sekunder yang lebih bersifat impersonal menjadi

lebih dominan. Dalam masyarakat tradisional atau pramodern, status, hubungan dan keterkaitan sosial lebih didasarkan pada apa atau siapa seseorang; latar belakang keluarga atau keturunan, suku atau ras, gender (pria atau wanita), dan usia (yang antara lain melahirkan paternalisme). Dalam masyarakat tradisional, di samping pertimbangan-pertimbangan itu, ada juga pertimbangan kemampuan (*capability*), tetapi lebih bersifat fisik (jagoan, misalnya) atau magis (paranormal). Dalam masyarakat modern apa dan siapa bukannya sama sekali diabaikan, tetapi bobotnya kurang dibandingkan dengan prestasi yang telah dicapai dan potensi yang dapat dicapai. Penghargaan terhadap kemampuan fisik tidak juga diabaikan, seperti pahlawan-pahlawan olahraga, tetapi penghargaan lebih besar diberikan kepada kemampuan intelektual. Sukses seseorang karena prestasinya dihargai tinggi dalam masyarakat modern. Manusia modern ingin memperoleh pengakuan sebagai individu, selain sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, untuk lebih terperinci, Alex Inkeles (1980: 87-99) menyebutkan sembilan ciri manusia modern, yaitu sebagai berikut.

- 1) Terbuka terhadap inovasi, perubahan, penanggungan risiko, dan terhadap gagasan-gagasan baru.
- 2) Tertarik dan memiliki kemampuan membentuk pandangan mengenai isu-isu yang berada di luar lingkungannya.
- 3) Lebih demokratis, terutama dalam hal pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat.
- 4) Lebih berorientasi terhadap masa kini dan masa depan daripada masa lalu.
- 5) Menempatkan masa depan dirinya ke dalam suatu perencanaan, visualisasi, dan pengorganisasian untuk mewujudkannya.
- 6) Cenderung tidak menerima keadaan sebagai nasib dan berpandangan bahwa keadaan dunia ini dapat diperkirakan dan terbuka untuk kendali manusia.
- 7) Menghargai hak-hak orang lain tanpa memandang status tradisionalnya sehingga pandangannya terhadap peran wanita dan anak-anak menjadi positif.
- 8) Menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen untuk mengendalikan alam.
- 9) Memiliki pandangan bahwa manusia harus dihargai berdasarkan kontribusinya terhadap masyarakat

d. Struktur Sosial

Struktur yang mewarnai suatu masyarakat tradisional berintikan kekerabatan, kesukuan, atau keagamaan. Struktur yang bersifat primordial itu tertutup bagi yang lain di luar hubungan-hubungan itu dan tidak bersifat sukarela. Dalam masyarakat modern, struktur sosial bersifat terbuka dan bersifat sukarela. Jadi, yang berkembang dan menjadi tiang-tiang masyarakat adalah organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial, termasuk organisasi profesional dan fungsional. Dalam masyarakat tradisional atau pramodern, organisasi-organisasi serupa itu sekalipun sudah ada, dasarnya masih tetap lebih bersifat primordial dan masih lebih tertutup. Akan tetapi, apabila kita berbicara mengenai struktur sosial, ada ciri-ciri yang nyata dalam masyarakat modern, yaitu:

- 1) Sebagian besar anggota masyarakat berada pada lapisan menengah; lapisan atas dan bawah adalah minoritas. Pada masyarakat tradisional dan pramodern, sebagian besar masyarakat berada di lapisan bawah;
- 2) Dalam masyarakat modern tidak tampak batas pemisah (*diskontinuitas*), tetapi stratanya lebih bersifat suatu kontinum. Dalam masyarakat tradisional, pembatas antarstrata sangat tegas, bahkan acapkali tabu atau ada sangsi bagi yang melewati batas itu;
- 3) Dalam masyarakat modern, mobilitas sosial tinggi baik ke atas maupun ke bawah. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional mobilitas itu rendah, yang di bawah betapa pun potensinya tetap di bawah, dan yang di atas betapa pun rendah kemampuannya tetap berada di atas;
- 4) Dalam masyarakat modern, pandangan keadilan, kesamaan hak, dan kewajiban menjadi kredo, berarti juga kesamaan kesempatan

G. Karakteristik Masyarakat Kota

Ada dua hal yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari masyarakat kota atau modern. Ada ciri yang berskala kelompok atau masyarakat dan ada ciri berskala individu. Ciri yang berskala masyarakat, yaitu sebuah masyarakat disebut telah modern (maju) antara lain:

1. Hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi.
2. Hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling memengaruhi
3. Mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Masyarakat kota berdeferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan.
5. Tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan
6. Aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan lebih berorientasi pada aturan atau hukum formal yang bersifat kompleks.
7. Tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi-pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya

Jorge Hardoy dalam Elly M Setyadi (2011: 854) memberikan ada 10 kriteria untuk merumuskan sebuah kota, yaitu sebagai berikut.

1. Memiliki ukuran dan penduduk yang besar dilihat dari zaman dan lokasinya.
2. Bersifat permanen.
3. Mencapai kepadatan tertentu (menurut zaman dan lokasi).
4. Jelas struktur dan tata ruangnya seperti dari jalur-jalur jalan di dalamnya.
5. Merupakan tempat manusia tinggal dan bekerja.
6. Memiliki fungsi minimum seperti adanya pasar, administrasi dan politik, militer, keagamaan, dan cendekia.
7. Mempunyai penduduk heterogen yang diklasifikasikan secara hierarkis.
8. Merupakan pusat ekonomi yang memiliki hubungan dengan daerah pertanian di tepi kota dan yang memproses bahan mentah dari daerah pertanian itu.
9. Merupakan pusat pelayanan bagi daerah-daerah yang berada di sekitarnya.
10. Merupakan pusat penyebaran falsafah hidup yang dimiliki (sesuai zaman dan lokasi).

Secara umum, suatu lingkungan perkotaan mengandung lima unsur (Elly M. Setyadi, 2011: 855) berikut.

1. Wisma. Unsur ini merupakan bagian ruang kota yang digunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya, serta melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial dalam keluarga. Unsur wisma ini berfungsi:
 - a. mengembangkan daerah perumahan penduduk yang sesuai dengan penambahan kebutuhan penduduk untuk masa mendatang;
 - b. memperbaiki keadaan lingkungan perumahan yang telah ada agar dapat mencapai standar mutu kehidupan yang layak, dan memberikan nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan.
1. Karya. Unsur ini merupakan syarat yang utama bagi eksistensi suatu kota karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat.
2. Marga. Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antarsuatu tempat dan tema atau dapat lainnya di dalam kota, serta antara kota itu dengan kota lainnya atau daerah lainnya.
3. Suka. Unsur ini merupakan bagian dari ruang perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan, kebudayaan, dan kesenian.
4. Penyempurna. Unsur ini merupakan bagian yang penting bagi kota, tetapi belum secara tepat tercakup ke dalam keempat unsur termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas keagamaan, pekuburan kota, dan jaringan utilitas kota

Secara fisik, masyarakat di perkotaan kehidupannya ditandai dengan adanya gedunggedung yang menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan, pabrik, kemacetan, kesibukan warga masyarakatnya, persaingan yang tinggi, polusinya, dan sebagainya. Adapun secara sosial, kehidupannya cenderung heterogen, individual, persaingan yang tinggi yang sering menimbulkan pertentangan atau konflik. Munculnya asumsi bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah tertipu, cekatan dalam berpikir, dan bertindak, dan mudah menerima perubahan, tidak selamanya benar karena secara implisit, di balik semua itu masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah standar kehidupan sosial. Untuk lebih memahami secara terperinci mengenai kehidupan masyarakat perkotaan, berikut diuraikan beberapa ruang lingkup kehidupan dari perkotaan (Elly M. Setyadi, 2011: 858-864)

1. Lingkungan umum dan orientasi terhadap alam. Masyarakat kota cenderung mengabaikan kepercayaan yang berkaitan dengan kekuatan alam serta pola hidupnya lebih mendasarkan pada rasionalnya. Apabila dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat kota tidak bergantung pada kekuatan alam, melainkan bergantung pada tingkat kemampuannya (kapabilitas) untuk bersaing dalam dunia usaha. Gejala alam itu bisa dipahami secara ilmiah dan secara rasional dapat dikendalikan.
2. Pekerjaan atau mata pencaharian. Kebanyakan masyarakatnya bergantung pada pola industri (kapitalis), bentuk mata pencaharian yang primer seperti sebagai pengusaha, pedagang, dan buruh industri. Namun ada sekelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal misalnya pemulung, pengemis dan pengamen.
3. Ukuran komunitas. Umumnya masyarakat perkotaan lebih heterogen dibandingkan masyarakat pedesaan. Karena mayoritas masyarakatnya berasal dari sosiokultural yang berbeda-beda, dan masing-masing dari mereka mempunyai

tujuan yang bermacam-macam pula, di antaranya mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan. Jumlah penduduknya masih relatif besar.

4. Kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Hal ini disebabkan kebanyakan penduduk di daerah perkotaan awalnya dari berbagai daerah.
5. Homogenitas dan heterogenitas. Dalam struktur masyarakat perkotaan yang sering tampak adalah heterogenitas dalam ciri-ciri sosial, psikologis, agama, dan kepercayaan, adat-istiadat, dan perilakunya. Dengan demikian, struktur masyarakat perkotaan sering mengalami interseksi sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial.
6. Diferensiasi sosial. Di daerah perkotaan, diferensiasi sosial relatif tinggi, sebab tingkat perbedaan agama, adat-istiadat, bahasa, dan sosiokultural yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai daerah cukup tinggi.
7. Pelapisan sosial. Lapisan sosialnya lebih didominasi oleh perbedaan status dan peranan di dalam struktur masyarakatnya. Di dalam struktur masyarakat modern lebih menghargai prestasi daripada keturunan.
8. Mobilitas sosial. Mobilitas pada masyarakat perkotaan lebih dinamis daripada masyarakat pedesaan. Kenyataan itu adalah sebuah kewajaran sebab perputaran uang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di pedesaan.
9. Interaksi sosial. Dalam interaksi pada masyarakat perkotaan lebih kita kenal dengan yang namanya *gesellschaft*, yaitu kelompok patembayan. Yang mana ada hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian-perjanjian tertentu yang orientasinya adalah keuntungan atau pamrih. Sehingga hubungan yang terjadi hanya seperlunya saja.
10. Pengawasan sosial. Dikarenakan masyarakatnya yang kurang mengenal satu sama lain dan juga luasnya wilayah kultural perkotaan ditambah keheterogenitasan masyarakatnya yang membuat sistem pengawasan sosial perilaku antaranggota masyarakatnya makin sulit terkontrol.
11. Pola kepemimpinan. Kepemimpinannya didasarkan pada pertanggung-jawaban secara rasional atas dasar moral dan hukum. Dengan demikian, hubungan antarpemimpin dan warga masyarakatnya berorientasi pada hubungan formalitas.
12. Standar kehidupan. Standar kehidupannya diukur dari barang-barang yang dianggap memiliki nilai (harta benda). Mereka lebih mengenal deposito atau tabungan. Karena menurut mereka, menyimpan uang dalam bentuk deposito dianggap lebih praktis dan mudah. Ditambah lagi kepemilikan barang-barang mewah lainnya.
13. Kesetiakawanan sosial. Ikatan solidaritas sosial dan kesetiakawanan lebih renggang. Ikatan ini biasa disebut dengan patembayan. Artinya, pola hubungan untung rugi lebih dominan daripada kepentingan solidaritas dan kesetiakawanan.
14. Nilai dan sistem nilai. Nilai dan sistem nilai dalam struktur masyarakat perkotaan lebih bersifat formal, berdasarkan aturan-aturan yang resmi seperti hukum dan perundangundangan.

BAB VIII KOTA DAN TRANSPORTASI

A. Pendahuluan

Jika dilihat dalam kerangka ekonomi makro, transportasi merupakan Tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan titik bahkan, dianggap sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan keberhasilan pembangunan pun sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi sehingga sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang andal berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan Dinamika Pembangunan, serta mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Prinsip pembangunan sistem transportasi berkelanjutan adalah: (a) kesetaraan sosial; yaitu layanan transportasi mampu menjangkau masyarakat yang paling miskin, (b) keberlanjutan ekologi; yaitu dampak lokal transportasi, seperti kebisingan dan polusi udara dan menggantikan kecenderungan ini dengan sistem transportasi yang lebih kecil kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan, (c) kesehatan dan keselamatan; transportasi memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan dan keselamatan.

B. Problem: Kemacetan

“Macet lagi, macet lagi”. Kalimat ini sering diucapkan banyak orang saat menghadapi kemacetan titik kemacetan lalu lintas adalah problematika perkotaan yang semakin marak dijumpai di kota-kota besar. Kemacetan hampir merata di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mereduksi masalah kemacetan lalu lintas di perkotaan perlu dibuat suatu kebijakan strategis dan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek teknik, sosial, ekonomi politik keamanan dan sebagainya. Apapun kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem transportasi pada akhirnya harus memihak kepada rakyat banyak dengan mengedepankan mudah aman dan lancar (tidak macet). Di Indonesia, masalah kemacetan dapat dikelompokkan dalam dua kategori yang saling berkaitan.

Pertama, berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur prasarana transportasi darat. Tidak berimbangnya rasio pembangunan prasarana jalan dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan menyebabkan jalan-jalan di perkotaan terasa semakin padat dengan kendaraan. Kedua, berkaitan dengan manajemen perkotaan dan manajemen transportasi, banyak kota besar di Indonesia yang belum memiliki "master plan". Jika sudah memiliki pun implementasinya tidak konsisten dengan isi rencana strategis yang ada di dalamnya titik akibatnya, akan timbul kesemrawutan di dalam kota dan penyebaran pergerakan lalu lintas akibat adanya kebangkitan dan tarikan lalu lintas sulit untuk dikendalikan.

Manajemen yang baik seharusnya menerapkan seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jika merujuk pada deming circle, fungsi-fungsi manajemen merupakan rangkaian proses dari P(Planning)- D(Do)- C(Chek)- A(Action). Manajemen perkotaan dan manajemen transportasi yang dijalankan di Indonesia Apabila enggan dikatakan berjalan sesuai fungsi-fungsi PDCA di atas, Hanya berupa kuratif action atau pencarian solusi permasalahan yang sifatnya tidak strategis titik masalah kemacetan lalu lintas di perkotaan yang merupakan salah satu bagian dari

permasalahan sistem transportasi perkotaan memang sangat kompleks penyebabnya sangat banyak dan saling berkaitan. Sistem transportasi perkotaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perkotaan secara keseluruhan, yang berarti kebijakan transportasi perkotaan tidak lepas dari keterkaitan dan kebijakan lainnya yang menyangkut pengaturan dan penataan perkotaan.

C. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi sebagaimana dikemukakan oleh Nasution adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan titik kegiatan tersebut mengandung tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapat jalan yang dapat dilalui. Untuk itu, dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan Pemberi Jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Jadi, transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang-barang.

Menurut Ofyar Z. Tamin, prasarana transportasi mempunyai dua peran, yaitu: (1) alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan (2) prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk diaksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Hal ini karena akibat pertumbuhan ekonomi mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. Pada satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah karena dengan adanya infrastruktur transportasi, suatu daerah dapat meningkatkan kegiatannya. Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan sebuah sistem transportasi yang andal efisien dan efektif. Adapun efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

2. Klasifikasi Transportasi

Klasifikasi transportasi dapat ditinjau dari 4 unsur transportasi, yaitu Jalan, alat angkut, tenaga penggerak, dan Terminal. Sebelum mengklasifikasikan menurut cara dengan unsur-unsur ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian keempat unsur transportasi tersebut.

- a. *Jalan*, merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi titik tanpa adanya jalan, tidak mungkin disediakan jasa transportasi bagi penggunanya.
- b. *Alat angkutan*, merupakan unsur transportasi yang paling penting. Perkembangan dan kemajuan jalan dan alat angkutan merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau saling berkaitan dengan yang lain alat angkutan ini dapat dibagi dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan jalan air dan alat angkutan jalan udara.
- c. *Tenaga penggerak*, yaitu tenaga atau energi yang digunakan untuk menggerakkan alat angkutan tersebut untuk keperluan ini dapat digunakan

tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, batubara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik.

- d. *Terminal*, yaitu tempat di mana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti atau berakhir.

Sehubungan dengan keempat unsur transportasi tersebut, transportasi dapat diklasifikasikan dari sudut jalan atau permukaan jalan yang digunakan alat angkutan yang dipakai dan tenaga penggerak yang digunakan. Klasifikasi transportasi ini adalah sebagai berikut.

a. Transportasi darat. Transportasi darat terdiri atas 2, yaitu:

- 1) Transportasi jalan raya meliputi transportasi yang menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, pedati sepeda motor, becak bus, truk dan kendaraan bermotor lainnya.
- 2) Transportasi jalan rel meliputi alat angkutan berupa kereta api Komeng terdiri atas lokomotif gerbong, tangki, box khusus, trailer dan kereta penumpang.

b. Transportasi melalui air dapat dibagi menjadi:

- 1) Transportasi air pedalaman, menggunakan alat angkutan berupa sampan, Kano, motor boat dan kapal.
- 2) Transportasi laut, menggunakan alat angkutan perahu, kapal uap, kapal mesin.
- 3) *Transportasi udara* merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan dan menggunakan udara atau angkasa sebagai jalannya titik yang dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi.

3. Karakteristik Sistem Transportasi

Faktor perbedaan karakteristik sistem transportasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemilihan moda di antara berbagai jenis moda angkutan umum. Faktor karakteristik sistem transportasi adalah sebagai berikut.

a. *Waktu perjalanan relative*

Dalam pengembangan model pemilihan moda saat ini, waktu perjalanan relatif antar transportasi yang ada berpengaruh dalam pemilihan moda angkutan titik waktu perjalanan relatif dapat diekspresikan sebagai suatu rasio suatu perjalanan dari pintu ke pintu di antara moda yang satu dengan moda yang lainnya pelayanan relatif yang disediakan oleh dua model diukur dengan rasio aksesibilitas masing-masing moda tersebut ukuran relatif waktu perjalanan antar moda yang berkompetisi adalah perbandingan waktu perjalanan Absolut antara satu mode dan moda lainnya

b. *Biaya perjalanan relative*

Biaya perjalanan relatif dapat diekspresikan sebagai perbandingan biaya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan antara satu moda dengan moda yang lainnya. Elemen biaya tersebut generalized cost dari suatu perjalanan.

c. *Tingkat prjalanan relative*

Tingkat pelayanan relatif yang ditawarkan oleh setiap moda angkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor-faktor tersebut kebanyakan adalah hal yang subjektif dan sulit di kuantifikasikan, misalnya: kecocokan (convert), kenyamanan (kontinental) dan kemudahan perpindahan moda.

Berdasarkan posisi pada model peramalan permintaan secara bertahap, model pemilihan moda dapat dikategorikan dalam dua kerangka utama berikut.

- 1) *Trip end modal splitmodel*, yaitu memberikan suatu pembagian seluruh jumlah permintaan perjalanan ke dalam moda transportasi yang ada, yang disebut juga predistribution model.
- 2) *Trip interchange modal split model*, yaitu model yang memberikan pembagian perpindahan perjalanan yang dihasilkan dari proses distribusi perjalanan ke dalam moda transportasi yang ada.

d. *Manfaat transportasi*

Beberapa manfaat transportasi adalah sebagai berikut.

- 1) Manfaat ekonomi
- 2) Manfaat sosial
- 3) Manfaat politis
- 4) Manfaat kewilayahan

e. *Konsep perencanaan transportasi*

Konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai saat ini dan paling populer adalah “Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap”. Model perencanaan ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Keempat dari submodel tersebut adalah:

- 1) Pemodelan Bangkitan dan Tarikan Perjalanan (*Trip generation and Trip Atraction*).
- 2) Pemodelan Sebaran / Distribusi perjalanan (*Trip Distribution*).
- 3) Pemodelan Pemilihan Kendaraan (*Model Split*).
- 4) Model Pemilihan Rute Perjalanan (*Traffic Assigment*)

f. *Kemacetan lalu lintas*

Pada dasarnya, kemacetan terjadi akibat dari jumlah arus lalu lintas pada suatu ruas jalan tertentu yang melebihi kapasitas maksimum yang dimiliki oleh jalan tersebut. Kemacetan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 5 tipe menurut biaya yang dikeluarkan, yaitu:

- 1) *Simple interaction*, yaitu kemacetan yang terjadi pada saat arus lalu lintas rendah dengan jumlah pergerakan yang kecil.
- 2) *Multiple interaction*, yaitu kemacetan yang terjadi pada saat arus lalu lintas lebih tinggi sehingga tiap bertambahnya kendaraan akan lebih menghalangi satu sama lain, meskipun kapasitas jalan belum digunakan secara optimal.
- 3) *Bottleneck situation*, yaitu kemacetan karena penyempitan lebar jalan sehingga ruas jalan tersebut mengalami penurunan kapasitas jalan dibanding ruas jalan sebelumnya/sesudahnya.
- 4) *Triggerneck situation*, yaitu kemacetan yang ditimbulkan oleh kemacetan “bottleneck”.
- 5) *Network and control congestion*, yaitu kemacetan yang terjadi karena adanya upaya dan pengelola jalan untuk mengurangi biaya kemacetan untuk beberapa waktu tertentu atau untuk jenis lalu lintas tertentu.

Sementara itu, beberapa gangguan terhadap kelancaran lalu lintas pada jalan-jalan di wilayah perkotaan adalah:

- 1) Pedagang kaki lima;

- 2) Parkir kendaraan di badan jalan;
- 3) Angkutan umum berhenti disembarang tempat;
- 4) Terjadinya penyempitan jalan, dan lainnya.

g. *penyebab masalah lalu lintas*

Perkembangan aktivitas di perkotaan mengakibatkan peningkatan beban jalan. Akibatnya berbagai macam jenis permasalahan lalu lintas terjadi, mulai penundaan, kemacetan, atau gangguan lainnya. Secara umum, penyebab terjadinya masalah lalu lintas adalah sebagai berikut.

- 1) Pertambahan penduduk di kota-kota besar, pertambahan ini berkisar 4-5% per tahun.
- 2) Perkembangan kota yang tidak diikuti struktur guna lahan yang sesuai.
- 3) Tidak seimbangnya jaringan jalan, fasilitas lalu lintas dan angkutan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
- 4) Makin jauhnya jarak perjalanan karena masyarakat mengalami pergeseran tempat tinggalnya ke arah luar kota/pinggiran, sebagai akibat perkembangan aktivitas ekonomi di pusat kota.
- 5) Penggunaan pribadi yang kurang efektif.
- 6) Kualitas dan kuantitas kendaraan umum yang belum memadai.
- 7) Kurang termanfaatkannya secara maksimal peran alat angkutan kurang mampu melayani massa yang baik dengan maksimal, seperti kereta api.

BAB XI

KOTA DAN ANAK JALANAN DAN GEPENG (GELANDANGAN PENGEMIS)

A. Pendahuluan

Kota penuh cerita. Ada cerita urbanisasi, industri, pedagang kaki lima, kemacetan, sebagaimana penjelasan terdahulu. Cerita berikutnya adalah anak jalanan dan gelandangan pengemis. Anak jalanan dan gelandangan pengemis merupakan kelompok anak dan para tunawisma yang sering ditemui serta menghiasi kota-kota besar di Indonesia. Jika kaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002, yang menjelaskan tentang perlindungan anak maka lengkaplah suatu peraturan yang melindungi hak-hak anak. Akan tetapi kenyataannya sungguh ironis. Sosok anak jalanan, gelandangan pengemis adalah kelompok yang selalu dipandang hina di mata masyarakat. Manakala menyebut anak jalanan, perhatian kita akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal.

Anak jalanan adalah sampah yang tidak lagi mempunyai masa depan, tidak bisa diharapkan sebagai generasi penerus pembangunan dan tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat. Statusnya sebagai anak jalanan, menyebabkan anak-anak itu harus rela dengan berbagai hinaan, cacian, makian, kekejaman, kekerasan dan kesan buruk masyarakat. Ini artinya ketika permasalahan sosial menimpa keluarga dan dirinya, dengan sendirinya ia mengalami penghilangan hak sebagai manusia dan hak sebagai anak oleh masyarakat.

B. Pengertian Anak Jalanan

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli, untuk menggambarkan kondisi anak jalanan yang sesungguhnya. PBB menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lainnya. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Beberapa studi menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya atau anak yang berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orangtua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilandi jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum atau anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah yang dengan berbagai cara (tidak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios). Berdasarkan pengertian di atas, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok berikut :

1. Children on the street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka.

2. Children of the street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.

3. *Children from families of the street*

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

Departemen sosial mengelompokkan anak jalanan menjadi empat kategori berikut.

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria: putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orangtuanya, tidak lagi sekolah.
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria: berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya, rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan cirinya adalah: setiap hari bertemu dengan orangtuanya (teratur), berada di jalanan sekitar 4 sampai 6 jam untuk bekerja.

Berkaitan dengan karakteristik anak jalanan, di antaranya:

1. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan, karakteristiknya:
 - C. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan;
 - D. Hidup dalam kelompok kecil atau perseorangan;
 - E. Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti terminal, emper, toko, kolong jembatan, dan pertokoan.
2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orangtua mereka setiap hari, karakteristiknya adalah:
 - a. Hubungan dengan orangtua masih ada, tetapi tidak harmonis;
 - b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah.
3. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG), karakteristiknya adalah:
 - a. Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan;
 - b. Sebagian sudah putus sekolah;
 - c. Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya.

C. Proses Terjadinya Anak Jalanan

Tjuk Kasturi Sukiadi (1999: 10) menjelaskan bahwa proses terjadinya anak jalanan dibagi dalam beberapa tahap.

1. Tahap I : pengetahuan sampai adanya ketertarikan. Ada kebiasaan semakin berkelompok dari anak-anak di perkampungan. Bersama kelompoknya, mereka berjalan-jalan ke tempat sebagaimana telah disepakati bersama. Pada tahap ini, keinginan menjadi anak jalanan masih bergantung pada masing-masing anak, seberapa besar perhatian dan ketertarikan pada pekerjaan tersebut.
2. Tahap II : ketertarikan sampai keinginan. Tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat "fasilitas", atau faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orangtua. Fasilitas tersebut akan semakin memperkuat keinginan anak untuk turun kejalan.
3. Tahap III: pelaksanaan. Anak mulai melaksanakan niatnya dengan mendatangi tempat operasi. Jika ia menemukan teman yang sudah dikenal, keinginan untuk menjadi anak jalanan segera terealisasi meskipun agak malu-malu.
4. Tahap IV: memasuki kehidupan anak jalanan. Dalam tahap ini, si anak akan terpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Hal ini juga bergantung pada diri anak itu sendiri dan teman yang membawanya. Yang tidak kalah penting, peranan orangtua untuk tetap mengontrolnya.

5. Tahap V: terjerumusnya atau kembali pada kehidupan wajar. Apabila dalam perkembangannya anak menyadari bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Kemungkinan kedua bila menerima stimulus baik dan kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, anak sudah masuk dalam kategori anak jalanan bebas norma agama dan kemasyarakatan cenderung ditinggalkan.

D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan

Banyak ahli telah meneliti tentang faktor-faktor penyebab kemunculan anak jalanan. Menurut Surya Munandar (1996: 45) ada sejumlah penyebab fenomena anak yang bekerja antara lain adalah tekanan ekonomi keluarga, dipaksa orangtua, diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa. Banyak orang mengira bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun kejalanan untuk bekerja dan hidup dijalan adalah kemiskinan. Akan tetapi, data dari literatur yang ada menunjuk kan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak turun kejalan. Secara umum, ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan (Depsos, 2001: 25-26)

1. Mikro (*immediatecauses*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya.
2. Messo (*underlyingcauses*), yaitu faktor yang ada dimasyarakat.
3. Makro (*basiccauses*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro.

Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan keluarga. Anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat *dropout* dari sekolah. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon pelaku kriminal. Pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektori nformal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama dijalan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi.
2. Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.
3. Belum beragam nya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan ibu sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai *trouble maker* atau pembuat masalah (*security approach* atau pendekatan keamanan).

Dengan kata lain, faktor-faktor yang membuat keluarga dan anaknya terpisah, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Pendorong
2. Faktor penarik

Disamping faktor-faktor tersebut, lingkungan komunitas juga merupakan penyebab bagi gejala anak di jalanan terutama yang erat kaitannya dengan fungsi stabilitas sosial dari komunitas itu sendiri. Ada dua fungsi utama stabilitas komunitas, yaitu pemeliharaan tata nilai, dan pendistribusian kesejahteraan dalam kalangan komunitas yang bersangkutan. Dalam pemeliharaan tatanilai, misalnya

tetangga atau tokoh masyarakat tidak menasihati ataupun melarang anak berkeliaran di jalan. Adapun berkenaan dengan pendistribusian adalah kurangnya bantuan dari tetangga atau organisasi sosial kemasyarakatan terhadap keluarga miskin dilingkungannya. Dengan kata lain, belum memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar dilingkungan komunitasnya. Hal lainnya sebagai faktor pendorong yang saling memengaruhi anak turun ke jalan, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan gejala masalah keluarga
2. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin
3. Migrasi desa atau kota dalam mencari kerja akibatnya kesengajaan
4. Melemahnya keluarga besar
5. Adanya kesengajaan sistem jaringan pengamanan
6. Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak
7. Meningkatnya anak putus sekolah karena alasan ekonomi
8. Kesengajaan komunikasi antara anak dan orang tua nya

E. Pengetian Gelandangan dan Pengemis

Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Istilah gepeng, sering ditujukan kepada peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Menurut Depertemen Sosial RI (2007: 5) gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Adapun pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi, gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Pengertian lain bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Jadi, ada tiga gambaran umum tentang gepeng ini, yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat;
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai;
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Engkus Kuswarno (197-198) membagi tiga kategori pengemis, sebagai berikut.

1. Pengemis berpengalaman, yaitu pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta.
2. Pengemis kontemporer, yaitu pengemis masa kini.
3. Pengemis berencana, yaitu pengemis ini melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya hasil yang mereka dapatkan ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi, seperti emas dan sebagainya.

F. Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Gepeng hingga saat ini menjadi masalah di kota-kota besar. Permasalahannya sangat akumulatif, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Masalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
4. Masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.
5. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta.
6. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis adalah salah satu mata pencaharian.
8. Masalah Kesehatan. Dari segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga Negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah akibatnya rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Selain permasalahan di atas ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut.
 - a. Masalah lingkungan.
 - b. Masalah kependudukan.
 - c. Masalah keamanan dan ketertiban

BAB X

KOTA DAN PENGANGGURAN

A. Pendahuluan

Pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah, tetapi masalah ini masih terus ada dan berkembang. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari situasi yang di dalamnya telah terjadi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, bahkan terus bertambah, antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja.

B. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenaga- kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Ada beberapa pengertian tentang pengangguran, yang dikemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut.

1. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force), tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Muana Nanga, 2005: 253).
2. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
2. Sadono Sukirno (2011: 59), mengatakan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Menurut Zainab Bakir dan Cris Maning (1984: 35) untuk mengelompokkan pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri, yaitu:

1. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan);
2. waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama);
3. produktivitas (kurangnya produktivitas sering disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

C. Sebab-Sebab Pengangguran

Beberapa faktor yang berkaitan terjadinya pengangguran, sebagaimana dijelaskan oleh Yesmil Anwar dan Adang (2013: 268) sebagai berikut.

1. Inflasi

Inflasi yang tinggi mendorong para produsen melakukan efisiensi terhadap Industrinya, di antaranya adalah restrukturisasi atau melakukan perampingan organisasi perusahaan yang berakibat semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, inflasi juga mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, di mana masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga akan mendorong terjadinya kenaikan upah. Peningkatan upah menyebabkan pengusaha cenderung beralih pada teknologi padat modal yang berarti mengurangi kesempatan kerja.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi terdapat hambatan-hambatan. Hambatan utama yang dihadapi negara sedang berkembang adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di negaranya, kualitas input tenaga kerja, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja yang kurang, serta teknologi yang tertinggal.

D. Jenis-Jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dibagi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangguran friksional atau transisi, yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan dalam syarat-syarat tenaga kerja yang terjadi karena perkembangan perekonomian.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja sehingga terjadi ketidaksesuaian antarpemintaan dan permintaan tenaga kerja.
3. Pengangguran alamiah, yaitu pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan sama dengan tingkat inflasi aktual.
4. Pengangguran terselubung terjadi karena jumlah tenaga kerja sangat berlebihan. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara. Sebagai akibat kelebihan tenaga kerja tersebut, sebagian tenaga kerja dari kegiatan bersangkutan dialihkan ke kegiatan lain. Pengangguran terselubung banyak ditemukan di negara sedang berkembang, terutama pada sektor pertanian.

Kecepatan migrasi yang lebih tinggi dari kemampuan kota-kota di negara sedang berkembang untuk menciptakan lapangan kerja baru menyebabkan tidak semua orang memperoleh pekerjaan di kota. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka yang menganggur dalam waktu yang cukup lama atau memperoleh kerja dengan waktu kerja yang lebih rendah dari jam kerja seharusnya. Pengangguran jenis ini disebut dengan setengah pengangguran.

Sadono Sukirno mengatakan bahwa berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangguran musiman, yaitu keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek.
2. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja.
3. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
4. Setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal .

E. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Pengangguran

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai pasar total market value dari barang-barang akhir dan jasa-jasa final goods and services yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

F. Dampak (Akibat) Pengangguran

1. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang.

2. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan menimbulkan ketidak stabilan sosial dan politik. Menurut Sadono Sukirno beberapa akibat buruk dari pengangguran dapat dibedakan dalam dua aspek berikut.

1. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang

2. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan memengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. menyebabkan kehilangan mata pencarian dan menyebabkan kehilangan keterampilan. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

G. Strategi Dan Program Penanggulangan Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok: Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu:

1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpinggirkan sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.
4. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
5. Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL.

BAB XI

KOTA DAN PEMUKIMAN KUMUH

A. Pendahuluan

Adanya peningkatan kegiatan atau aktivitas ekonomi, kota menjadi sasaran investasi atau penanaman modal masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil (sektor informal). Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan di pusat kota tersebut. Masyarakat yang bekerja di pusat kota kemudian mencari tempat tinggal tidak jauh dari tempat dia bekerja. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan pemukiman kota.

Untuk memperjelas masalah manusia dan lingkungannya bab ini, menggunakan istilah pemukiman. Pemukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri, laju penduduk kota pun semakin tinggi sehingga pertumbuhan pemukiman baru bagi warga kota ikut meningkat.

Meningkatnya pertumbuhan tempat tinggal di perkotaan yang tidak terkendali yang menyebabkan adanya pemukiman liar. Pemukiman liar terjadi dari proses migrasi yang tidak sehat, sehingga untuk mencari tempat tinggal, mereka menempati tanah-tanah negara.

Salah satu masalah yang melingkari masyarakat kota adalah merosotnya kualitas lingkungan permukiman di daerah perkotaan yang memunculkan:

1. lingkungan permukiman yang kondisinya amat jelek dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
2. perkampungan yang tidak ditata dengan teratur, dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak memadai;
3. kampung-kampung dengan prasarana lingkungan yang sangat minim.

Permasalahan tentang menurunnya kualitas lingkungan permukiman hingga saat ini telah diatasi dengan program perbaikan kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Kampung Improvement Program*” (KIP) yang bertujuan memperbaiki perkampungan miskin atau permukiman yang kurang layak huni.

B. Problem: Pemukiman dan Kemiskinan

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan, membawa dampak beragam permasalahan seperti kemacetan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, dan munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum (*slum area*), terutama pada lahan-lahan kosong, seperti jalur hijau di sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman-taman kota maupun di bawah jalan layang.

Pemukiman kumuh (*slum area*) adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun nonteknis. Tjuk Kuswantojo (2005: 184) mengatakan, pemukiman kumuh, yaitu pemukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana dan pelayanan pemukiman minim merupakan akibat dari kemiskinan.

Meskipun ada pengecualian dan keadaan khusus, pada umumnya kita sepakat bahwa pemukiman kumuh ditempati oleh masyarakat miskin. Sekalipun demikian,

penanganan pemukiman kumuh tidak dengan sendirinya berarti menolong penduduk miskin. Boleh jadi pemukiman kumuh akan menjadi lebih baik karena diganti dengan rusun (rumah susun), atau lingkungan yang lebih baik tetapi hal ini hanya ditujukan untuk memoles wajah kota.

Di telaah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu kondisi fisiknya, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, dan dampak oleh kedua kondisi tersebut. *Pertama*. Kondisi fisik tersebut tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik. *Kedua*. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pemukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. *Ketiga*. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu, kawasan pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi.

C. Pengertian Pemukiman Kumuh

Apa sebenarnya pemukiman kumuh itu? Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Permukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya permukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*.

Permukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia (*human*). Dengan demikian, perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi (Sri Kurniasih, 2007: 30). Adapun kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman. Titi sari dan Farid Kurniawan (1999: 8-9) menjelaskan empat aspek berikut:

1. kondisi bangunan atau rumah;
2. ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status penduduk; dan
3. berdasarkan aspek penduduk, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun nonswadaya oleh masyarakat.

Kemudian Rudiyanono (2000: 8) menentukan dua standar permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut.

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari struktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan.
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria nonfisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Dalam UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Khomarudin (1997: 82) menjelaskan bahwa lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang memiliki hal-hal berikut. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha); kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah; jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya di bawah standar; sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan diatur perundang-undangan yang berlaku. Adapun gambaran lingkungan kumuh, adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan.
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
3. Rumah hanya tempat untuk berlindung dari panas dan hujan.
4. Bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni.
5. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.
6. Prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan).
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan).
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal.
9. Pendidikan masyarakat rendah.

Menurut Budi Sinulingga (2005: 83), ciri-ciri kampung atau permukiman kumuh adalah sebagai berikut.

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/Ha, timbul masalah akibat kepadatan ini, antarapemukiman yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.
2. Jalan-jalan sempit yang tersembunyi di balik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan, kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Di antaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan, atau membeli secara kalengan.

6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan sangat darurat.
7. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Berdasarkan asal atau proses terjadinya, pemukiman kumuh terdiri atas tiga macam, sebagaimana dijelaskan Sutanto (1995: 67), yaitu sebagai berikut.

1. Kumuh bangunan (*created*), daerah hunian masyarakat ekonomi lemah dengan ciri fisik, yaitu bangunan mudah dipindah, dibangun dengan bahan seadanya, dan sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh sejak awal).
2. Kumuh turunan (*generated*), cirinya adalah rumah-rumah yang semula dibangun dengan izin, pada bagian kota yang lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi rumah kumuh; Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat; Bangunan dan prasarana merosot oleh kurangnya pemeliharaan.
3. Kumuh dalam proyek perumahan (*in project housing*), cirinya adalah kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah; rumah-rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangat jelek yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana

D. Faktor Penyebab Tumbuhnya Pemukiman Kumuh

Menurut Khomarudin (1997: 81), penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut.

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Sulit mencari pekerjaan
3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah
4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah.
6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003: 3-5), penyebab permukiman kumuh adalah:

1. Karakter bangunan, yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat;
2. Karakter lingkungan, yaitu tidak ada *open space* (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

Mulyono Sadyohutomo (2005: 134-135) menjelaskan penyebab munculnya pemukiman kumuh, yaitu:

1. pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang cukup;
2. keterlambatan pemerintah kota dalam merencana dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.

Menurut mereka, keadaan kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari:

1. penampilan fisik bangunannya yang makin kontruksi, yaitu banyaknya bangunan temporer yang berdiri serta tampak tidak terurus maupun tanpa perawatan;
2. pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi penghuninya;
3. kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antara bangunan maupun siteplan yang tidak terencana;
4. kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen;
5. sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik;
6. kondisi sosial yang tidak dapat baik dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal;
7. banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

Ciri atau karakteristik lainnya dari permukiman kumuh dijelaskan oleh Silas (1996:47) adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh di bawah standar, rata-rata 6m²/orang, sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun, karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, fasilitas lingkungan tersebut tidak sulit mendapatkannya.
2. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (dasar keterjangkauan), baik membeli atau menyewa.
3. Manfaat permukiman di samping pertimbangan lapangan kerja dan harga.
4. Murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

E. Dampak Urbanisasi Terhadap Perkembangan Pemukiman Kumuh

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kota-kota besar adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi dapat diartikan tingkat kota atau persentase jumlah penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan jumlah penduduk seluruhnya dan juga berarti suatu proses menuju bentuk perkotaan (Kusumawijaya, 2006). Terdapat dua pengertian yang terkandung dalam istilah urbanisasi, yaitu:

Pertama, proses terbentuknya kota baru yang kompleks karena migrasi dari desa yang bersifat homogen (desa atau kota kecil) ke daerah heterogen (perkotaan). *Kedua*, menunjuk kepada perkembangan daerah yang bersifat homogeny kepada heterogen, ataupun karena perkembangan masyarakat lokal ataupun masyarakat migrasi lain (Hariyono,2007). Grunfeld dalam Daldjoeni (2003), mengemukakan ada dua jenis urbanisasi. Pertama, pengkotaan fisik yang berarti perkembangan dalam bentuk kepadatan penduduk, pembangunan gedung dan variasi tata guna lahan. Kedua, orientasi mengikut nilai-nilai kebiasaan di kota besar, hal ini disebabkan Karena adanya *pull factor* (faktor penarik), dan *push factor* (faktor pendorong). Meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan disebabkan oleh urbanisasi, dan tampak jelas dari pemukiman liar dan kumuh, juga terbatasnya pelayanan kesehatan, dan SDA (Soegijoko, 2005).

Pemukiman kumuh ini dipandang merusak keindahan kota dan menjadi pusat kekacauan seperti banyaknya pengangguran, kejahatan, pelacuran serta borok sosial lainnya. Keadaan seperti ini seharusnya tidak mampu memberi kesempatan bagi proses transformasi migran perdesaan ke dalam urban yang dapat berlangsung secara wajar (Daldjoeni, 2003).

BAB XII

KOTA DAN KRIMINALITAS

A. Pendahuluan

Melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahkan, kriminalitas dapat dikatakan sebagai muara dari problematika perkotaan. Hal ini karena terjadinya tindak kriminal secara sosiologis terkait dengan masalah jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah pengangguran, dan jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Kartini Kartono (2003: 142-143) menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, kejahatan terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor biologis, sosiologis, ekonomis, mental (agama, bacaan, harian-harian, film); fisik (keadaan iklim dan lain-lain), dan pribadi (umur, ras dan nasionalitas, alkohol, perang). Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan jaman. Perkembangan masyarakat yang semakin maju menyebabkan kejahatan pun ikut mengalami perubahan baik pada sisi bentuk maupun modusnya. Oleh karena itu, sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas perkembangan kejahatan di Indonesia terus bertambah.

Selama lima tahun terakhir 2009-2013, kejahatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 dari 341.159 kasus menjadi 342.084 kasus. Sekalipun terjadi penurunan dari tahun 2011 dari 347.605 kasus menjadi 341.159 kasus, dan data di atas, tindak kejahatan mengalami fluktuasi dan ada kecenderungan semakin meningkat.

B. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dikenalkan oleh Antropolog Perancis, P. Topinard (1830-1911), yaitu secara harfiah berasal dari dua kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, baik kriminologis teoretis maupun kriminologis murni. Kriminologi teoretis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya." Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, yaitu sebagai berikut.

J. Constant memberikan definisi kriminologi ini sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Noach, definisi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. W.A. Bonger memberikan definisi bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, hingga membagi kriminologi ini mencakup sebagai berikut:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial.

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis.
4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh ber-kembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Edwin H. merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama sosiologi hukum, etiologikejahatan, penology. Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Wolfgang, Savitz dan Johnston memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

C. Pengertian Kejahatan

Ada berbagai macam sudut pandang tentang pengertian kejahatan, yaitu sebagai berikut. Pertama. Sudut pandang hukum Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua, dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Abdulsyani, (1987:) menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek yaitu

1. Aspek yuridis, kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
2. Aspek sosial, kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Aspek ekonomi, kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa teori yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Lebih lanjut, Beccaria (Made Darma Weda, 1996: 21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa memandang umur, kesehatan jiwa, kaya

miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut". Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memerhatikan sifat pembuat dan kemungkinan adanya peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas sehingga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

3. Teori Kartogra atau Geogra

Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri, seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

7. Teori Biososiologis

Tokoh aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu, seperti keadaan psikis dan fisik pelaku kejahatan karena faktor lingkungan.

8. Teori NKK (Niat + Kesempatan = Terjadi Kejahatan)

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini,

sebab terjadinya kejahatan adalah adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi, meskipun ada niat, tanpa kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik (Alam AS dan Amir Ilyas, 2010: 79), terdiri atas tiga bagian pokok berikut:

1. Pre-Emtif.

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Contoh: di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara, seperti Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif.

Upaya-upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Contoh: ada orang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor ditempatkan di tempat penitipan motor. Dengan demikian, kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*lawenforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

Lebih lanjut, Alam AS dan Amir Ilyas (2010: 81) mengemukakan beberapa teori tentang tujuan penghukuman (tujuan pemidanaan) sebagai berikut:

1. Teori pembalasan (*vergelding theorie*), teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Menurut teori ini, seseorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan yang menyiksa fisiknya agar ia menjadi jera. Pelaksananya tentu sangat kejam pada mulanya. Pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, tetapi hak ini diambil alih oleh raja atau pemerintah.
2. Teori penjeraan (*afschriking/deterrence*), teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti (*deterrence theorie*). Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat.
3. Teori penutupan (*onschadelike /incarceration*), pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan-tindakan karantina memang sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
4. Memperbaiki (*verbeterings theorie*), teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah memperbaiki si terhukum itu sendiri.

BAB XIV KOTA DAN KEMISKINAN

A. Pengantar

Kemiskinan masih menjadi masalah global. Artinya kemiskinan bukan hanya masalah besar dinegara berkembang, tetapi juga masih menjadi masalah dinegara maju. Hampir semua Negara berkembang, hanya dibeberapa Negara saja penduduk yang dapat menikmati pembangunan, selebihnya mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah realitas social yang masyarakat tidak dapat hindari. Kemiskinan selain dirasakan oleh orang miskin itu sendiri, juga berakibat buruk bagi masyarakat. Karena adanya kemiskinan maka akan adanya pengangguran, banyak orang kelaparan, anak-anak tidak sekolah yang akan mengakibatkan mereka bodoh, dan masih banyak lainnya. Untuk mengurangi semua itu, banyak masyarakat yang menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas.

Selain masyarakat desa, kemiskinan juga melanda masyarakat kota. Kemiskinan pada masyarakat kota lebih mengarah pada persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya yang akan menambah dalam jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian, muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (*survival of the fittes*), yaitu ang kuat akan tetap bertahan hidup dan yang lemah akan tersisihkan. Kemiskinan merupakan fenomena masalah struktual dan multidimensional yang meliputi politik, social, ekonomi, harta benda dan lain-lain. Dimensi kemiskinan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk berikut.

1. Dimensi politik yang sering muncul dalam bentuk tidak adanya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka.
2. Dimensi social dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi social yang ada, serta terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia serta etos kerja mereka.
3. Dimensi lingkungan yang sering muncul dalam bentuk sikap, peilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman.
4. Dimensi ekonomi yang muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan. Sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sampai batas yang layak.
5. Dimensi asset ini ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk asset kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Dari dimensi-dimensi diatas, kemiskinan dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

1. *Kemiskinan alamiah*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia.
2. *Kemiskinan struktual atau buatan*, yaitu kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tetenan kelembagaan yang memihak pada kentingan pribadi atau golongan tertentu yang penyudutkan pihak lain.

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan

pendekatan program yang *parsial, sektoral*, dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri.

B. Problem: Potret Kemiskinan di Indonesia

Sangat ironis, kota selalu diidentikkan dengan kemajuan dan kemunduran, namun isi lain dari kemiskinan dan kemakmuran bercampur, berpadu dan dihadirkan sebagai potret kehidupan diberbagai sudut kota. Dijalan-jalan kota kita dapat melihat mobil-mobil mewah melintas dan pada saat yang sama para pengemis mengulurkan tangan dan meminta belas kasihan. Kemiskinan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Kemiskinan telah merampas kualitas pendidikan jutaan anak, kesulitan dalam membiayai pelayanan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses kelayanan public, kurangnya pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan keluarga, intensifikasi urbanisasi di kota. Kemiskinan juga memaksa jutaan orang untuk memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan perbekalan.

Hampir 5 juta balita di Indonesia menderita kekurangan gizi dan 1,8 juta kurang gizi tersebut bersifat *irreversible*. Salah satu gejala dari kekurangan gizi yang *irreversible* itu aalah perkembangan otak balita yang lambat. Akibatnya, banyak anak yang *imbisil* dan *debil* (bodoh) dinegeri ini. Indonesia adalah Negara agraris, tetapi lebih dari 37% anak Indonesia usia 0-5 tahun (balita) kekurangan gizi yang ditandai dengan bentuk fisik *stunded* atau tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Slain itu, dibeberapa provinsi banyak kasus yang sama yaitu anak-anak tumbuh dan kembang tidak sesuai dengan umur mereka. Dibawah ini adalah data tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia, berdasarkan data BPS bulan September 2014:

Tabel 14.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin		Peresentasi Penduduk Miskin	
		Kota	Desa	Kota	Desa
1	Aceh	158.04	679.38	11.36	19.19
2	Sematera Utara	667.47	693.13	9.81	9.89
3	Sumatera Barat	108.53	246.21	5.41	7.84
4	Riau	159.53	338.75	6.53	8.93
5	Kepulauan Riau	91.27	32.90	5.61	10.54
6	Jambi	109.07	172.68	10.67	7.39
7	Sumatera Selatan	370.86	714.94	12.96	13.99
8	Bangka Belitung	20.27	46.96	3.04	6.84
9	Bengkulu	99.59	216.91	17.19	17.04
10	Lampung	224.21	919.73	10.68	15.46
11	DKI Jakarta	412.79	0.00	4.09	0.00
12	Jawa Barat	2554.06	1684.90	8.32	10.88
13	Banten	381.18	268.01	4.47	7.18
14	Jawa Tengah	1771.53	2790.29	11.50	15.35
15	DI Yogyakarta	324.43	208.15	13.36	16.88
16	Jawa Timur	1531.89	3216.53	8.30	15.92
17	Bali	109.20	86.76	4.35	5.39

18	Nusa Tenggara Barat	385.31	431.31	19.17	15.52
19	Nusa Tenggara Timur	105.70	886.18	10.68	21.78
20	Kalimantan Barat	78.53	303.38	5.47	9.20
21	Kalimantan Tengah	39.45	109.37	4.75	6.74
22	Kalimantan Selatan	61.21	128.28	3.68	5.64
23	Kalimantan Timur	98.48	154.20	3.98	10.06
24	Sulawesi Utara	60.08	137.48	5.57	10.47
25	Gorontalo	23.88	171.22	6.24	23.21
26	Sulawesi Tengah	71.65	315.41	10.35	14.66
27	Sulawesi Selatan	154.40	651.95	4.93	12.25
28	Sulawesi Barat	29.87	124.82	9.99	12.67
29	Sulawesi Tenggara	45.79	268.30	6.62	15.17
30	Maluku	47.58	259.44	7.35	25.49
31	Maluku Utara	11.17	73.62	3.58	8.85
31	Papua	35.61	828.50	4.46	35.87
33	Papua Barat	14.06	211.40	5.52	35.01

C. Pengertian Kemiskinan

Menurut parah Ahli, bahwa pengertian dari kemiskinan itu ialah sumber-sumber kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Seperti contohnya dalam hal pangan, sandang, papan, pendidikan, dan Kesehatan serta hidup serba kekurangan. Berikut Faktor- faktor penyebab kemiskinan.

1. Rendahnya taraf Pendidikan
2. Rendahnya derajat Kesehatan
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
4. Kondisi Keterisolasian

Tiga pendekatan ilmiah yang cukup populer dalam memahami kemiskinan

1. Pendekatan Kultural, yaitu upaya penanaman kebhinekaan terhadap masyarakat. Untuk menghilangkan budaya kemiskinan tersebut, Lewis menyarankan agar orang-orang miskin bersatu dalam suatu organisasi. Sebagaimana Lewis, Oman Sukmana (2005: 151) mengatakan setiap gerakan, baik gerakan bersifat religius, pasifis, ataupun revolusioner yang mengorganisirkan dan memberikan harapan bagiorang miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas dapat menghancurkan sifat-sifat utama yang merupakan ciri orang-orang dari budaya kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi budaya miskin tersebut diperlukan lembaga yang memihak masyarakat miskin tersebut.
2. Pendekatan Situasional, yaitu suatu teori yang berusaha mencari Jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi yang bersifat universal. Charles A. Valentine menggunakan asumsi yang berbeda dari asumsi Lewis. Ia mengatakan bahwa mengubah keadaan orang-orang miskin ke arah yang lebih baik harus dilakukan secara simultan dalam tiga hal, yaitu penambahan resources (kesempatan kerja, pendidikan, dan lain-lain), perubahan struktur sosial masyarakat, perubahan di dalam subkultur masyarakat miskin tersebut. Sumber perubahan yang paling mungkin dilakukan menurut pendapat Valentine adalah gerakan-gerakan sosial untuk menghidupkan kembali keyakinan atau rasa percaya diri para kelompok miskin. Gerakan ini harus berasal dari

dalam kelompok tersebut sehingga hambatan-hambatan kultural yang merupakan ciri masyarakat miskin akan terkikis.

3. Pendekatan Interaksional, yaitu perilaku manusia yang sudah tertanam di dalam diri orang miskin yang disebabkan adanya faktor situasi yang menekan. Gans berpendapat bahwa orang miskin bersifat heterogen. Ia menolak anggapan bahwa kebudayaan itu bersifat holistik yang elemennya hanya dapat berubah bila mana semua sistem budaya tersebut berubah. Menurutinya, pemecahan terakhir masalah kemiskinan terletak pada usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat orang miskin untuk menggunakan kesempatan yang tersedia, dan usaha untuk memberikan keyakinan mereka untuk menggunakan kesempatan yang tersedia walaupun kesempatan yang tersedia tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan dalam sistem ekonomi, struktur kekuasaan, dan norma-norma serta aspirasi kelompok orang kaya yang ikut memungkinkan timbulnya kelompok orang miskin.

Dari ketiga pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendati kemiskinan melekat kepada individu atau perseorangan, bukan berarti semata-mata merupakan tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen negara (bangsa), atau stakeholders (seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga birokrat/apparat pemerintahan, lembaga swasta, dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat). Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi hal-hal yang menyebabkannya dan cara mengatasinya bergantung pada ideologi yang dipergunakan.

D. Indikator Kemiskinan (Ardianyah Tambunan)

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach), dan pendekatan objective and subjective.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset, dan alat-alat produktif, seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini

menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar, seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan objektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

E. Model Penghitungan Kemiskinan

1. Model tingkat konsumsi pada awal tahun 1970-an, Sajogyo (1982) membuat model penghitungan kemiskinan dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Ia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.
2. Model Kesejahteraan Keluarga
Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit surveinya pun berbeda. BPS menggunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB), yaitu “Keluarga yang Berkualitas”. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

F. Penyebab Kemiskinan

Menurut pandangan penganut fungsionalisme, kemiskinan timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (subsistem) yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Merton, konsep disfungsi ini sangat berguna dalam mengembangkan pendekatan fungsional terhadap masalah sosial. Kemiskinan terdiri atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998). Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin.

Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan. Walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita (1996) disebut sebagai “Persisten Poverty”, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.

Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolir. Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya yang menjadikan mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya.

Akibatnya, tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural disebabkan upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan merencanakan bermacam-macam program dan kebijakan, tetapi karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata. Kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat menurut Sutiyastie adalah pendapatan yang rendah. Jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan lain, dan tingkat pendidikan merupakan karakteristik dari keluarga miskin yang berhubungan dengan kemiskinan masyarakat. Kemiskinan di perkotaan kebanyakan adalah para pendatang dari desa yang migrasi ke kota tanpa memiliki keterampilan dan pendidikan serta modal usaha. Mereka hanya menjadi pegawai pabrik dengan upah yang sangat rendah sehingga menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi mengandung arti adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu masyarakat.

Adanya kesenjangan sosial-ekonomi sangat berhubungan dengan sistem pelapisan sosial yang membedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas, yaitu kelas sosial-ekonomi yang tinggi dan kelas sosial-ekonomi yang rendah. Adanya kesenjangan sosial-ekonomi menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat, yaitu pada satu pihak, masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai dan pada pihak lain, masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang tidak memadai. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa pada saat bersamaan, kemiskinan terutama kemiskinan relatif —terus bertahan bahkan cenderung meningkat.

M. Sitorus (1994: 186) menjelaskan faktor penyebabnya kemiskinan, terdiri atas dua bentuk kemiskinan.

1. Kemiskinan Alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang muncul sebagai akibat kebutuhan sumber daya alamiah yang langka, seperti tanah pertanian yang tidak subur atau perkembangan teknologi yang sangat rendah.

2. Kemiskinan Buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang sengaja dibuat oleh manusia. Seperti kemiskinan akibat pengaruh warisan kolonialisme.

Kemiskinan buatan sering juga disebut dengan kemiskinan Struktural, karena struktur sosialnya yang menyebabkan kemiskinan Tersebut terjadi. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang Diderita seseorang atau kelompok masyarakat karena struktur sosial Yang sengaja diciptakan sehingga seseorang atau kelompok tidak Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan hidup Yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Penyebab kemiskinan struktural ini antara lain kemajuan Industri yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan, Peminjaman modal yang menuntut bunga yang tinggi, upah kerja Yang rendah, penguasaan tanah, dan pengurusan rumah penduduk.

Kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang Diciptakan, khususnya lembaga yang berhubungan dengan bidang Ekonomi, membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana-Sarana ekonomi dan fasilitas lainnya secara merata. Pada satu pihak, Beberapa anggota masyarakat menguasai sarana fasilitas ekonomi Secara memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara Pada pihak lain, beberapa anggota masyarakat sama sekali tidak Menguasai sarana dan fasilitas ekonomi secara memadai. Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural juga timbul Sebagai dampak dari adanya modernisasi dan pembangunan. Modernisasi dan pembangunan secara umum memang mendorong Tingkat pendapatan rata-rata (per kapita) meningkat, tingkat kesehatan Membaik, tingkat rata-rata pendidikan meningkat, dan sebagainya, Tetapi hasil modernisasi dan pembangunan itu tidak merata dinikmati Oleh semua warga. Faktor penyebab ketidakmerataan ini adalah Struktur sosial yang mengalami disfungsi yang berlaku dalam lapisan masyarakat.

G. Ciri-Ciri Kemiskinan

M. Sitorus menjelaskan (1994:200) bahwa orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri berikut:

1. Tidak memiliki factor produksi, seperti tanah yang cukup, mahal, dan keterampilan.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau model usaha.
3. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD atau SLTP.
4. Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu untuk belajar.
5. Kebanyakan terjadi dipedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada sangat kecil sekali. Umumnya, mereka menjadi butuh tani atau pekerja kasar diluar area pertanian. Karena pertanian bersifat musiman, bahkan ada yang jadi pengangguran atau gelandangan. Kesenambungan kerja mereka kurang terjadi. Banyak diantara mereka menjadi pekerja keras atau berusaha apa saja.
6. Kebanyakan yang hidup dikota, masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan, sehingga mereka bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang becak, pembantu rumah tangga,. Beberapa dari mereka bahkan menjadi pengangguran atau gelandangan.

Adapun Email Salim (1984: 42-43) menyebutkan 5 ciri kemiskinan, yaitu:

1. Tidak memiliki factor produksi.

2. Tingkat pendidikan rendah.
3. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.
4. Kebanyakan tinggal di desa.
5. Banyak hidup dikota berusia muda dan tidak memiliki skill.

H. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kalangan pemerhati masalah kemiskinan mencoba memilah kemiskinan dalam empat bentuk yang masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.
2. Kemiskinan relatif adalah kondisi yang pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
4. Kemiskinan kultural karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya (Oman Sukmana,

Keempat bentuk kemiskinan harus dipandang sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada disekitar kita.

I. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi:

1. upaya menciptakan ketenteraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik;
2. mengendalikan jumlah penduduk;
3. melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan.

Adapun kebijakan yang langsung mencakup:

1. pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting);
2. penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan);
3. penciptaan kesempatan kerja;
4. program pembangunan wilayah; dan
5. pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Selain itu, upaya

penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

1. Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yaitu berpihak kepada orang miskin.
2. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.
3. Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

J. P2KP: Model Pemberdayaan Kemiskinan di Perkotaan

1. Pengertian

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau disingkat dengan P2KP, merupakan proyek penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan. Program ini telah dijalankan sejak tahun 1999 yang berupaya menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. P2KP menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, dengan intensitas sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Visi P2KP adalah Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, aman, produktif dan lestari. Misi P2KP adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan (Pedoman Umum P2KP, 2002: 13). Tujuan P2KP adalah sebagai berikut.

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal.
 - b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerja sama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM).
 - c. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/Kabupaten agar mereka semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.
- ### **2. Strategi program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)**

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, strategi yang dilaksanakan Pertama, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju

masyarakat berdaya. Strategi P2KP untuk mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat berdaya, terdiri atas empat hal berikut.

- b. Internalisasi nilai-nilai prinsip universal, sebagai fondasi yang kokoh untuk memberdayakan masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat yang mandiri dan mampu mewujudkan pembangunan pemukiman berkelanjutan.
- c. Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (community based development), yaitu masyarakat membangun dan mengorganisasikan dari atas dasar ikatan pemersatu (common bond)
- d. Pembelajaran penerapan konsep tridaya dalam penanggulangan kemiskinan, menekankan proses pemberdayaan sejati (bertumpu pada manusia-manusianya) dalam rangka membangkitkan ketiga daya yang dimiliki manusia, agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, tercipta masyarakat ekonomi produktif dan masyarakat pembangunan yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat, produktif dan lestari.
- e. Penguatan akuntabilitas masyarakat, menekankan proses membangun dan menumbuhkembangkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli melakukan kontrol sosial secara objektif dan efektif sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin dan mendorong kemandirian serta keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Kedua, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri. Strategi P2KP untuk mampu mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri, setidaknya terdiri atas dua hal berikut.

- a. Pembelajaran kemitran antar-stakeholders strategis, yang menekankan proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota/kabupaten, dan kelompok peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri dan berkelanjutan.
- b. Penguatan jaringan antarpelaku pembangunan, dengan membangun kepedulian dan jaringan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pembangunan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2001. Pelaksanaan Otonomi Luas. Jakarta: Rajawali.
- Abidin, Zaenal dkk. 2006. Ngaji dan Ngejo. Bandung: Setda Jabar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, Abu. 1997. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alam, AS. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1999. Pengantar Kajian Islam. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Andisti, Miftah A. dan Ritandiyono. 2008. Religiusitas dan Perilaku Seks Bebas pada Dewasa Awal. Jurnal Psikologi. Vol. 1. No. 2.
- Anwar, Yesmil dkk. 2013. Sosiologi untuk Universitas. Bandung: Refika Aditama.
- Arifin. 1993. Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arni, Muhammad. 1995. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asy'ari, Safari Imam. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bajari, Atwar. 2002. Anak Jalanan. Humaniora.
- Bakir, Zainab dan Cris Maning (1984). Angkatan Kerja Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Banawi, Imam. 1993. Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Baratha, I Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat Desa, dan Pengembangan Desa. Jakarta: Ghalia.
- Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bergel, Egon E.. 1955. Urban Sociology. New York: McGrawHill. Eko A. Meinarno, dkk. 2011. Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Billah, MM.. 2001. Good Governance dan Kontrol Sosial. Jurnal Prisma. Jakarta: LP3ES.
- Bintarto. 1979. Metode Analisa Geografi. Jakarta: LP3ES.
- Bintarto. 1984. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BKKBN. 2009. Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009. Jakarta: BKKBN.
- Boediono. 1999. Pembiayaan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Daerah Kumuh Perkotaan, Daerah Pantai dan Desa Tertinggal. Jakarta: Pengarahan dalam Raker Menko Kesra dan Taskin.

- BPS. 2009. Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009, Jakarta. Badan Pusat Statistik. Jakarta BPS-Statistic Indonesia, Bappenas, and UNDP. 2004. The Economics of Democracy: Financing.
- Budiarto, Diani dkk. 2005. Perspektif Pemerintahan Daerah Otonomi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik. Bogor: Fisip Universitas Djuanda.
- Budiharjo, Eko. 1997. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Andi.
- Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia ke Tiga. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.
- Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Terjemah: Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni. 1997. Seluk Beluk Masyarakat Kota. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni. 2003. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni. David Berry. 2003. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darmawan, E. 2009. Ruang Publik Dalam Arsitektur Kota. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Depag RI. 2000. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI-Badan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Depsos RI. 2007. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Ketiga. Bandung: Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1996. Anatomi Kejahatan di Indonesia. Bandung: Granesia.
- Dirjen Departemen Sosial RI. 1979. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Pedoman Pembinaan Program dan Kegiatan Karang Taruna. Jakarta: Depsos.
- Dumairy. 1996. Perekonomian di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanti. 2005. Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik dan Aktivasnya di Kawasan Panbil Kota Batam. Semarang.
- Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda.
- Esten, Murstal. 1999. Kajian Transformasi Budaya. Bandung: Angkasa.
- Gazalba, Siddi. 1969. Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu. Jakarta: Pustaka Antara.
- Gee, Mc. dan Yeung. 1977. Hawkers In South East Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy. Ottawa, Canada: Penerbit Internasional Development Research Centre.

- George, Honadle dan Van Sant Jerry. 1985. *Implementation for Sustainability*. West Harffard: com Rumania Prest.
- Gerungan, W.A.. 1996. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung: Eresco.
- Goldthorfe, J.E.. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pengembangan*. Jakarta Gramedia Utama.
- Goode, William J.. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gulick, J. 1969. *Cultural Continuities in the Twentieth Century Middle Eastern Cultures*. Dalam Ira Lapidus, (ed.), *Middle Eastern Cities*, (Berkeley: University of California Press.
- Gunarsa, Singgih D.. 1989. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- H.A.W. Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Hardi, Utomo dan Hakim R. 2008. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap Prinsip-Unsur dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsojo. 1988. *Pengantar Antropologi*. Bandung. Bina Cipta.
- Hasan Sadelly. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haviland. 1985. *Anthropologi*. Terjemahan R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Herry, B. & Priyono. 2002. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. Terjemahan Aminuddin Ram. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurairah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa.
- Hurlock, Elizabet B. 1980. *Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhsantono. 2009. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Inkeles, Alex. 1980. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Iskandar, Jusman. 2002. *Bahan-bahan Perkuliahan Teori Sosiologi*. Bandung: Program Pasca Sarjana UIN Bandung.
- Jamaludin, Adon Nasurullah. 2013. *Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana UIN Bandung.
- Jayadinata, Johara T.. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

- Jayadinata, T. Johara dan Pramandika I.G.T. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Jonson, Paul Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*. Jakarta: Gramedia.
- Julius. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kahmad, Dadang. 2005. *Perkembangan dan Paradigma Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Mekanisme Pengontrolan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Ratu Adil*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2007. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Keesing. *Kin Groups and Social Structure*. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher.
- Kelurahan, Kecamatan. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Rustiadi dan Pranoto. 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Kenworthy, Jeffrey R. 2006. *The Eco-City: Ten Key Transport and Planning Dimensions Forsustainable City Development*. Perth: Murdoch University.
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, Rakasindo.
- Koenjtraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Kunowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, Sri. 2007. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan*. Jakarta: Penelitian.
- Kusmaryani, Rosita Endang. 2009. Disampaikan dalam kegiatan penyuluhan “Upaya Penyelamatan Generasi Muda Melalui Penyuluhan Pengetahuan Bahaya dan Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” tanggal 8 September 2009.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 2005. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kustur, Raldi Hendro. 2001. *Dimensi Keruangn Kota*. Jakarta: UI Press.

- Kusumah, Mulyana W. 1981. Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi. Bandung: Granesia.
- Kusumawijaya, Marco. 2006. Kota Rumah Kita. Jakarta: Borneo.
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia. Bandung: Penerbit ITB.
- Laurie, Michael. 1994. Arsitektur Pertamanan. Bandung: Intermatra .
- Mahfud. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Makroekonomi (Edisi Enam). Jakarta: Erlangga.
- Mantra, IB. 1992/1993. Population Development Analysis According to the 1990 Population Census: Mobility Dynamics. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.
- Mantra, IB. 2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Medan: Refika Aditama.
- Mc. Auslan, Patrick. 1986. Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata. Jakarta: Gramedia.
- Meinarno, Eko A.. 2011. Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Meno, S. dan Mustamin Alwi. 1992. Antropologi Perkotaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meno, S. dan Mustamin Alwi. 1992. Antropologi Perkotaan. Jakarta: Rajawali Press.
- Miro, Fidel. 1997. Sistem Transfortasi Kota: Teori dan Konsep Dasar. Bandung: Tarsito.
- Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Jogyakarta: Resist. Roger M. Keesing. 1980. Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Neagara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moesono, A dkk. 1996. Faktor-faktor Pendukung Terjadinya Perkelahian Sekolah dan Kecenderungan Pemecahan Masalah oleh Siswa. Kerja Sama Proyek Pembinaan Anak & Remaja. Dirjend Kebudayaan dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan & Budaya Lembaga Penelitian UI.
- Moore, Wilbert. 1965. The Impact of Industry. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Mubyarto. 1995. Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. Dalam Awan Setya Dewanta. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Adytia Media.
- Mubyarto. 1996. Ekonomi Rakyat dan Program IDT. Yogyakarta: Aditya Media.

- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Jatinangor, Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mulandar, Surya (ed.). 1996. Dehumanisasi Anak Marginal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Bandung: Akatiga.
- Muluk, M. R. Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Malang: Bayu Media Publishing.
- Mulyani, T.H.. 2006 . Arsitektur Ekologis . Yogyakarta: Kanisius. Tata Sudrajat. 2008. Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Lembaga. Jakarta: Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan.
- Mulyono, Y. Bambang. 1993. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Kansius.
- Murdiyanto, Eko. 2008. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Wimaya Press UPN "Veteran".
- Mustofa, M. 1998. Perkelahian Massal Pelajar antarsekolah di DKI Jakarta: Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan ParadigmaKonstruksivisme. Disertasi (Tidak Diterbitkan). Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Mutakin, Awan dkk. 1987. Sosiologi: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Bandung: IKIP.
- Muthari, Murtha. 1995. Masyarakat dan Sejarah. Bandung: Mizan.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narwoko, Dwi. J. dan Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta; Kencana.
- Nasikun. 2004. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution. 1996. Manajemen Transfortasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Ortuzar, J. de D. dan L.G. Willumsen. 1994. Modeling Transport. Second edition. Chicheste: John Wiley and Sons Ltd.
- Pahdepie, Fahd dkk. 2006. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Umat. Bandung: Sekda Provinsi Jabar.

- Pelzer, Karl J.. 1991. Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, WJS. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranaka, A.M.W. dan Prijono Anny S. 1996. Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Proceedings of the Joint UN/UNESCO, Urbanizations in Asia and Far East, A Seminar held in Calcutta. 1959.
- Purwandari, Eny. 2011. Keluarga, Kontrol Sosial, dan “STRAIN”: Model Kontinuitas Delinquency Remaja. Jurnal Humanitas. Vol. VIII No 01.
- Rachbini, D.J.. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Rahardja dan Manurung. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia. Jakarta: FEUI.
- Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian. Yogyakarta: UGM Press.
- Rakhmat. 2013. Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan: Pedagang PKL. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co.
- Ratmaningsih, Neiny. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Raucek, S. dan L. Warren. 1984. Sociology an Introduction. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara.
- Reksohadiprodjo, S.. 1997. Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropika. Yogyakarta: BPF.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan, Hana Karlina dan Hana Karlina. 2006. Agresi pada Siswasiswa SLTA yang Melakukan dan Tidak Melakukan Tawuran Pelajar. Tesis yang tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2009. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rondinelle, Denis. 1990. *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu*. Jakarta: Bina Aksara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyada, Dede dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Roucek, Josep S.. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ruchiyat, Eddy. 1984. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)*. Bandung: Alumni.
- Rudiyantono. 2000. *Model Program Intervensi dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh Perkotaan: Studi Kasus Permukiman Penerima Program Intrvensi di Surabaya*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November.
- Rusli, Said. 1981. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Rustiadi, Ernan dan Sugimin Pranoto. 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan*. Bogor: Crestpen Press.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saefullah, A. Asep Djaja. 1999. *Gerak Penduduk Desa-Kota: Jembatan Modernisasi perdesaan*. Bandung: Universitas Padjajaran (tidak diterbitkan).
- Safe'I, Agus Ahmad dan Nanih Machendrawaty. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Pisau Analisa Kriminologi*. Bandung: Armico. Jalaluddin Rahmat. 2002. *Psikologi Agama Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Salahuddin, Odi. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Salim, Emil. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Santosa, Mas Ahmad. tt. *Good governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saptana, Tri Pranadji dan Roosgandha. 2003. *Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi*

- Bali dan Bengkulu). Bengkulu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sarwono, Sarlito W.. 2010. Psikologi Remaja Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sasongko, Tri Hadiyanto. 2006. Seri Bibliografi Bercatatan: Potret Petani Basis Pembauran Agraria. Bandung: YayasanAkatiga.
- Sastraatmadja Entang. TT. Petani di Tanah Merdeka. Bogor: Petani Center.
- Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial. Jakarta:Kencana.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aflikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.
- Shadily, Hasan. 1993. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siahaan, Ronal dkk. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa,
- Simadjuntak, B. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.
- Simandjuntak, Payaman J. 1990. Pengantar Ekonomi Sumber DayaManusia. Jakarta: LPFE UI.
- Simanjuntak, B. 1984. Latar Belakang Kenakalan Remaja. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2006. Struktur Sosial dan SistemPolitik Batak Toba hingga 1945. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sinulingga, Budi. 1999. Pembangunan Kota Tinajuan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinulingga, Budi. 2005. Pembangunan Kota Tinajuan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sitorus, M. 1994. Berkenalan Dengan Sosiologi 2. Jakarata: Erlangga.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati et al. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto, dkk (editor). 2005. Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21. Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan B.S. Kusbiantoro (ed.). 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Press.

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum: Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keliarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Soelaiman, Munandar. 1993. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Soelaiman, Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarjan, Selo. 1974. *Bunga Rampai Sosiologi*. Jakarta: UI Press. Siagian. t.t. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soeriatmadja, R.E.. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Soesrodihardjo, Iih. 1991. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Solikhah, Zakiatus. 1999. *Identitas Sosial serta Alasan Keterlibatan dan Ketidakterlibatan Pelajar dalam Tawuran*. Depok: Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Sosialismanto, Duto. 2011. *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. 1990. *Cetakan ketiga Puluh Tiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdaata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. Sujoko. 2010. *Hubungan antara Keluarga Broken Home, Pola Asuh Orangtua dan Interaksi Teman Sebaya dengan Kenakalan Remaja*. Tesis Universitas Setia Budi Surakarta.
- Sugiono, Soetomo. 2013. *Urbanisasi dan Morfologi. Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 1989. *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi Politik dan Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Sumaatmadja, Nursid. 1986. *Pengantar Studi Sosial*. Bandung: Alurni.
- Sumardi, Muljanto dan Hans Dieter Evers (editor). 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*, Jakarta: Gramedia.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Jakarta: Read.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sunarto, K. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sundrum, R.M.. 1987. *Distribusi Pendapatan, Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES BPS.
- Suparjan, Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suparlan, Parsudi. 2000. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Surtiani, Eny Endang. 2006. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Sutrisno. 2005. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisi.
- Suwarsono. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Suwarsono. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Suyono dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi: Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

- Tamin, Ofyar Z.. 1997. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung.
- Tauchid, M. 1953. *Masalah Agraria. Bagian Pertama*. Jakarta: Tjakrawala.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Titisari, Ema Yunita dan Farid Kurniawan. 1999. *Kajian Permukiman Desa Pinggiran Kota; Mengukur Tingkat Kekumuhan Kampung*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. 2007. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo. 2009. *Kajian Lokasi Kawasan Industri Besar dan Persebarannya di Kota Salatiga*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Waridah, Siti Q. 1996. *Sosiologi: Deskriptif Analitik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Warsono, Agus. 2006. *Perkembangan Permukiman Pinggiran Kota pada Koridor Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*. Semarang: Tesis, Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- White, Rob. 2008. *Geng Remaja Fenomena dan Tragedi Geng Remaja di Dunia*. Yogyakarta.
- Widiastuti, Wahyu. 2002. *Dampak Adegan Kekerasan di Televisi terhadap Perilaku Agresif Remaja Perkotaan*. Bengkulu: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anaroga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widjajanti, Retno. 2009. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota: Studi Kasus: Simpang Lima Semarang*. Jurnal Teknik, Vol. 30., No.3, tahun 2009.

- Widodo, Ahmadi. 2000. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL. Semarang: Hasil Penelitian.
- Wirawan, Sarlito S.. 1989. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali.
- Wisadirana. 2005. Sosiologi Pedesaan. Malang: Univ. Muhammadiyah Malang.
- Yunus, Hadi. 2002. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi. 2005. Manajemen Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. Industrialisasi Pinggiran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Syamsu. 2009. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Rosda Karya.
- Yuwono, Teguh, ed. 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Universitas Diponegoro.